

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo ini. Dokumen ini merupakan Perubahan perencanaan strategis Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 – 2021 yang disusun untuk dijadikan arahan, pedoman dan landasan operasional bagi masyarakat perikanan pada umumnya dalam melaksanakan pembangunan di bidang perikanan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun di Kabupaten Sidoarjo.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen ini. Kami sadar sepenuhnya bahwa dokumen renstra ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna, untuk itu maka saran dan masukan yang bersifat membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan dan perbaikan penyusunan renstra yang akan datang.

Semoga Perubahan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 ini bermanfaat bagi pembangunan perikanan di Kabupaten Sidoarjo

Sidoarjo, 2020

KEPALA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN SIDOARJO

**Ir. M. BACHRUNI ARYAWAN, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19661228 199208 1 002

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
BAB I :PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	5
1.4. Sistematika Penulisan .....	
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN	
2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perikanan	1
2.2. Sumber Daya Dinas Perikanan .....	11
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo.....	21
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo .....	2
BAB III : ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo .....	1
3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	1
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan.....	3
3.4. Telaah Renstra Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur .....	4
3.5. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	4
3.6. Penentuan Isu Strategis .....	6

BAB IV : TUJUAN, INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN	
4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah .....	1
BAB V : STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
5.1. Strategi Dan Kebijakan OPD .....	5
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF .....	
6.1. Rencana Program .....	VI-2
BAB VII : INDIKATOR KINERJA DINAS PERIKANAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .....	
	VII-1
BAB VIII : PENUTUP .....	
	VIII-
1	

# DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	
Sarana dan Prasarana Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo .....	II-16
Tabel 2.2	
Inventarisasi Laboratorium Dinas Perikanan .....	II-18
Tabel 2.3	
Daftar Pusat Pendaratan Ikan Tahun 2016 .....	II-19
Tabel 2.4	
Capaian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011-2015 .....	II-22
Tabel 2.5	
Target dan Realisasi Anggaran Periode 2011-2015 .....	II-27
Tabel 4.1	
Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perikanan .....	IV-3
Tabel 4.2	
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perikanan Tahun 2017-2021 .....	IV-7
Tabel 5.1	
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 .....	V-5
Tabel 5.2	
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 -2021 .....	V-22

Tabel 6.1

Indikator Kinerja Dinas Perikanan yang mengacu RPJMD Tahun 2016

-2021 ..... VI-3

Tabel 6.2

Indikator Kinerja Dinas Perikanan yang mengacu RPJMD Tahun 2017 ..... VI-5

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	
Struktur Organisasi Dinas Perikanan .....	II-2
Gambar 2.2	
Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan.....	II-13
Gambar 2.3	
Data Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	II-14
Gambar 2.4	
Data Pegawai berdasarkan Usia .....	II-15



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka setiap Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi; (a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah; (b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah; dan (c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan.

Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. OPD juga menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-OPD. Berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 272 menyatakan bahwa Renstra-OPD memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Renstra-OPD dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja OPD (Renja-OPD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2021 merupakan suatu pedoman bagi arah kebijakan dan proses pelaksanaan pembangunan di

bidang perikanan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2016-2021 dengan memperhitungkan kondisi untuk kelangsungan pembangunan yang akan datang.

Rencana Strategis ini berkedudukan dan berfungsi sebagai acuan dan tolak ukur yang jelas bagi Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo, sehingga keberhasilan dan kegagalan dalam implementasinya dapat diukur secara jelas dan tepat. Agar Rencana Strategis dapat bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo ke depan, maka diperlukan adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo, tetapi juga seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan stakeholder lainnya yang ada di Sidoarjo. Dalam penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo 2016 – 2021 sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021, sehingga Rencana Strategis ini dijadikan rumusan umum dalam mengimplementasikan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan di bidang perikanan serta mempertimbangkan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, Rencana Strategis Provinsi dan Kabupaten termasuk juga Rencana Kerja OPD. Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, dalam segala aspek, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan evaluasi dan lebih disempurnakan baik secara parsial maupun menyeluruh.

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perikanan ini dilandasi berbagai peraturan perundangan yang berlaku antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Patroli);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tetang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
17. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Kelautan Dan Perikanan Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2026;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
22. Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 70 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo.
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
24. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PP18 Tahun 2016
25. Permendagri 86 tahun 2017
26. Permendagri 70 Tahun 2019
27. Permendagri 90 Tahun 2019

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Perikanan adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan menjadi acuan resmi para pemangku kepentingan terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang perikanan dalam kurun waktu lima tahun.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun 2016-2021 ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo dalam mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran serta program prioritas Bupati Sidoarjo periode 2016-2021.

2. Tersedianya pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo dalam kurun waktu lima tahun ke depan, terutama dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
3. Memberikan indikator untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Review Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Tahun 2016-2021 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

##### **BAB I Pendahuluan**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II Gambaran Pelayanan OPD**

- 2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD
- 2.2. Sumber Daya OPD
- 2.3. Kinerja Pelayanan OPD
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

##### **BAB III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD
- 3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L terkait
- 3.4. Renstra Provinsi SKPD Provinsi
- 3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
- 3.6. Penentuan Isu-isu strategis

##### **BAB IV Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

- 4.1. Tujuan dan Indikator Tujuan Jangka Menengah OPD.
- 4.2. Strategi dan Kebijakan OPD

**BAB V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif**

**BAB VI Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

**BAB VII Penutup**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS**

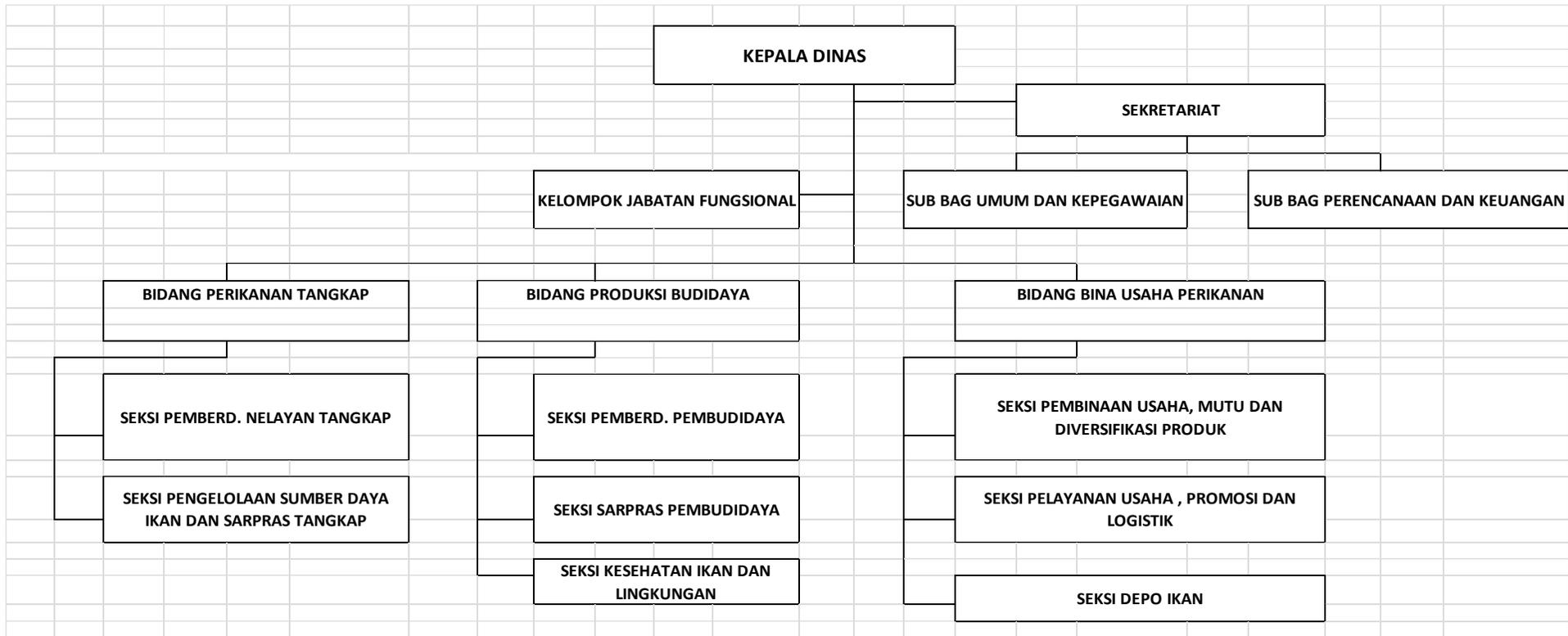
#### **PERIKANAN**

##### **2.1 TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN**

Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo, Dinas Perikanan terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
  - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Perikanan Tangkap
  - a) Seksi Pemberdayaan Nelayan Tangkap
  - b) Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Sarana Prasarana Tangkap
4. Bidang Produksi Budidaya
  - a) Seksi Pemberdayaan Pembudidaya
  - b) Seksi Sarana Prasarana Budidaya
5. Bidang Bina Usaha Perikanan
  - a) Seksi Pembinaan Usaha, Mutu Dan Diversifikasi Produk Perikanan
  - b) Seksi Pelayanan Usaha, Promosi dan Logistik
  - c) Seksi Depo Ikan
6. Kelompok Jabatan Fungsional
7. Unit Pelaksana Teknis



**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo**

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 70 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo, Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas ***“Membantu Bupati Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan bidang Perikanan Serta Tugas Pembantuan yang Diberikan Kepada Kabupaten”***

Dalam menjalankan tugas, Dinas Perikanan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Kelautan dan Perikanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang Kelautan dan Perikanan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Kelautan dan Perikanan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Perikanan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **A. Tugas Pokok dan Fungsi**

Dinas Perikanan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Rincian tugas pokok dan fungsi struktural akan dijelaskan sebagai berikut:

1. **Kepala Dinas Perikanan** mempunyai tugas memimpin, koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Dinas Perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Perikanan mempunyai fungsi:
  - a. Perencanaan program bidang Kelautan dan Perikanan serta kesekretariatan;
  - b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas;
  - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dinas;
  - d. Pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
  - e. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati;
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya;

2. Kepala Dinas Perikanan berwenang menandatangani izin bidang kelautan dan perikanan yang tidak ditangani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3. **Sekretariat** mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi:
  - a. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program dan laporan;
  - b. Pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
  - c. Pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugasnya.

Guna menunjang pelaksanaan tugasnya, Sekretariat terdiri dari:

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
  - a. Melaksanakan pelayanan surat-menyurat, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
  - b. Melaksanakan pengelolaan barang;
  - c. Menerima dan mengkoordinasikan tindaklanjut pelayanan permohonan perizinan dan pengaduan masyarakat
  - d. Melaksanakan pembinaan dan administrasi kepegawaian;
  - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:
  - a. Mengumpulkan dan mengelola data dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan program;
  - b. Menyusun laporan dinas;
  - c. Menyusun rencana kebutuhan anggaran;
  - d. Melaksanakan administrasi keuangan;
  - e. Melaksanakan laporan pengelolaan keuangan;
  - f. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugasnya.

4. **Bidang Perikanan Tangkap** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang perikanan tangkap. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan kebijakan teknis perikanan tangkap;
  - b. Pelaksanaan kegiatan perikanan tangkap, meliputi pemberdayaan nelayan tangkap, pengelolaan sumber daya ikan dan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
  - c. Pelaporan pelaksanaan kegiatan perikanan tangkap;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Guna menunjang pelaksanaan tugasnya, Bidang Perikanan Tangkap terdiri dari beberapa seksi antara lain:

- 1) Seksi Pemberdayaan Nelayan Tangkap mempunyai tugas:
  - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan Nelayan tangkap;
  - b. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pemberdayaan nelayan tangkap, meliputi :
    1. Pelatihan dan bimbingan teknis sarana dan prasarana penangkapan ikan , penanganan ikan diatas kapal dan keselamatan Nelayan di laut;
    2. Sosialisasi undang-undang dan kebijakan pemerintah di bidang perikanan tangkap;
    3. Melaksanakan kebijakan penggunaan alat tangkap dan alat bantu penangkapan ikan yang ramah lingkungan;
    4. Melaksanakan bantuan / hibah kepada nelayan dan masyarakat pesisir untuk peningkatan pendapatan;
    5. Pembinaan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan;
    6. Pemberdayaan dan perlindungan nelayan kecil;
    7. Penguatan kelembagaan nelayan dan masyarakat pesisir;
    8. Pengembangan ekonomi masyarakat pesisir;

- 9. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan petambak garam;
  - 10. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS)
- c. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi statistik perikanan tangkap;
  - d. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pemberdayaan nelayan tangkap;
  - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- 2) Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikan dan Sarana Prasarana Tangkap mempunyai tugas:
- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap dan sarana prasarana perikanan tangkap;
  - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis sarana prasarana perikanan tangkap ;
  - c. Menyiapkan bahan pemulihan sumber daya ikan dan daya dukung produktifitas sumber daya perairan;
  - d. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis sarana prasarana tangkap meliputi :
    - 1. Menyusun dan menganalisa rencana pembangunan dan pengembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
    - 2. Menyusun dan menganalisa rencana pembangunan sarana prasarana perikanan tangkap;
    - 3. Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perikanan tangkap;
    - 4. Melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana perikanan tangkap kelompok nelayan;
  - e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan alat maupun bahan-bahan yang merusak dan berbahaya pada kegiatan penangkapan ikan di perairan;

- f. Melaksanakan pengawasan pemanfaatan dan pengelolaan ekosistem dan lingkungan pesisir;
- g. Pelaksanaan pendampingan pelaksanaan proses penyidikan dan pelanggaran kasus Perikanan dan Kelautan;
- h. Menyiapkan bahan Laporan pelaksanaan teknis pengelolaan sumber daya ikan dan sarana prasarana perikanan tangkap;
- i. Melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

5. **Bidang Produksi Budidaya** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang produksi budidaya. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Produksi Budidaya mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis produksi budidaya;
- b. Pelaksanaan kegiatan produksi budidaya, meliputi pemberdayaan pembudidaya dan sarana prasarana budidaya dan kesehatan ikan serta lingkungannya;
- c. Pelaporan pelaksanaan kegiatan produksi budidaya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Guna menunjang pelaksanaan tugasnya, Bidang Produksi Budidaya terdiri dari beberapa seksi antara lain:

- 1) Seksi Pemberdayaan Pembudidaya mempunyai tugas:
  - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan pembudidaya;
  - b. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pemberdayaan pembudidaya, meliputi :
    - 1. Pelatihan dan pembinaan budidaya air payau, budidaya air tawar;
    - 2. Pengembangan inovasi teknologi budidaya air payau dan budidaya air tawar;

3. Identifikasi dan verifikasi usaha perikanan budidaya serta dokumen Surat Tanda Daftar Usaha Perikanan Budidaya;
  4. Fasilitasi sertifikasi hak atas tanah pembudidaya;
  5. Identifikasi dan memfasiliasi kebutuhan pupuk untuk budidaya perikanan;
  6. Fasilitasi pengadaan BBM untuk pembudidaya ikan air payau, air tambak
  7. Identifikasi dan memfasilitasi kebutuhan pupuk dan pakan ikan untuk budidaya perikanan;
  8. Fasilitasi pengajuan Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB)
  9. Pengawasan, pengamatan dan menganalisa mutu benih;
  10. Identifikasi pembudidaya air payau dan air tawar;
  11. Evaluasi dan penilaian Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) air payau dan air tawar;
  12. Fasilitasi pengadaan BBM untuk pembudidaya ikan air payau dan air tawar;
  13. Hibah untuk pembudidaya ikan air payau dan air tawar;
  14. Melaksanakan operasional tambak dinas dan BBI;
  15. Pendampingan pada pembudidaya ikan air payau dan air tawar;
- c. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pemberdayaan pembudidaya;
  - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- 2) Seksi Sarana Prasarana Budidaya mempunyai tugas:
- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis sarana prasarana budidaya;
  - b. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis sarana prasarana budidaya, meliputi;

1. Identifikasi, inventarisasi prasarana budidaya;
  2. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana budidaya;
  3. Pengelolaan sarana tambak dinas dan Balai Benih Ikan (BBI);
- c. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis sarana prasarana budidaya;
  - d. Melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
  - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- 1) Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya mempunyai tugas:
- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kesehatan ikan dan lingkungan;
  - b. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis kesehatan ikan dan lingkungan meliputi :
    1. Sosialisasi obat ikan kimia, bahan biologi dan residu;
    2. Pengawasan peredaran obat ikan ke toko obat dan pembudidaya;
    3. Pengambilan sampel air di lahan budidaya dan perairan umum untuk pengujian kualitas air dan mikrobiologi ke laboratorium level II;
    4. Pengambilan sampel ikan untuk uji residu dan mikrobiologi ke laboratorium level II;
    5. Monitoring di lapangan tentang kualitas air dan penyakit;
    6. Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya air serta melakukan pemulihan
  - c. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;
  - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya;.

**6. Bidang Bina Usaha Perikanan** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang Bina Usaha Perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengolahan, Kesehatan dan Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis bina usaha perikanan;
- b. Pelaksanaan kegiatan bina usaha perikanan meliputi pembinaan usaha, mutu dan diversifikasi produk , pelayanan usaha , promosi dan logistic serta depo ikan;
- c. Pelaporan pelaksanaan kegiatan bina usaha perikanan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Guna menunjang pelaksanaan tugasnya, Bidang bina usaha perikanan terdiri dari beberapa seksi antara lain:

2) Seksi Pembinaan Usaha, Mutu dan Diversifikasi Produk mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan usaha, mutu dan diversifikasi produk;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pembinaan usaha, mutu dan diversifikasi produk, meliputi :
  1. Melaksanakan identifikasi pelaku usaha perikanan skala usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
  2. Melaksanakan fasilitasi akses permodalan bagi pelaku usaha perikanan skala usaha mikro dan kecil;;
  3. Melaksanakan analisis kebutuhan dan pengembangan sarana prasarana pengolahan produksi perikanan;
  4. Melaksanakan diversifikasi teknologi hasil perikanan;;
  5. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis diversifikasi produk hasil perikanan;
  6. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan produk perikanan non konsumsi;

- 7. Melaksanakan identifikasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan usaha perikanan;
  - c. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pembinaan usaha, mutu dan diversifikasi produk;
  - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- 3) Seksi Pelayanan Usaha, Promosi dan Logistik mempunyai tugas:
- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan usaha, promosi dan logistik.
  - b. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pelayanan usaha, promosi dan logistik, meliputi :
    - 1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan usaha;
    - 2. Menyiapkan rekomendasi Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP); dan menerbitkan Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI);
    - 3. Melaksanakan pendataan dibidang pelayanan usaha perikanan;
    - 4. Melaksanakan analisis kebutuhan dan pengembangan sarana dan prasarana pemasaran produk perikanan;
    - 5. Melaksanakan pengelolaan informasi harga produk perikanan;
    - 6. Melaksanakan pendataan distribusi produk hasil perikanan dan peningkatan konsumsi dan logistik;
  - c. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pelayanan usaha, promosi dan logistik;
  - d. Melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
  - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang;
- 4) Seksi Depo Ikan mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Depolkan;

- b. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis Depo Ikan;
  - c. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis Depo Ikan;
  - d. Pengelolaan sarana dan prasarana Depo Ikan;
  - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
2. **Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)** adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan yang bersifat teknis operational dan atau penunjang tertentu. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan pembinaan teknis dilaksanakan oleh Kepala Bidang sesuai tugasnya.
3. **Kelompok Jabatan Fungsional** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perikanan sesuai dengan keahlian.

Dampak perubahan SOTK Dinas Perikanan yang berlandaskan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo adalah perubahan notulensi, tugas dan fungsi bidang. Hal ini berimplikasi pada semakin banyaknya fungsi akan tetapi tidak diimbangi dengan kualitas SDM Dinas Perikanan khususnya pada Bidang Perikanan Tangkap dan Bidang Produksi Budidaya.

## 2.2 Sumber Daya Dinas Perikanan

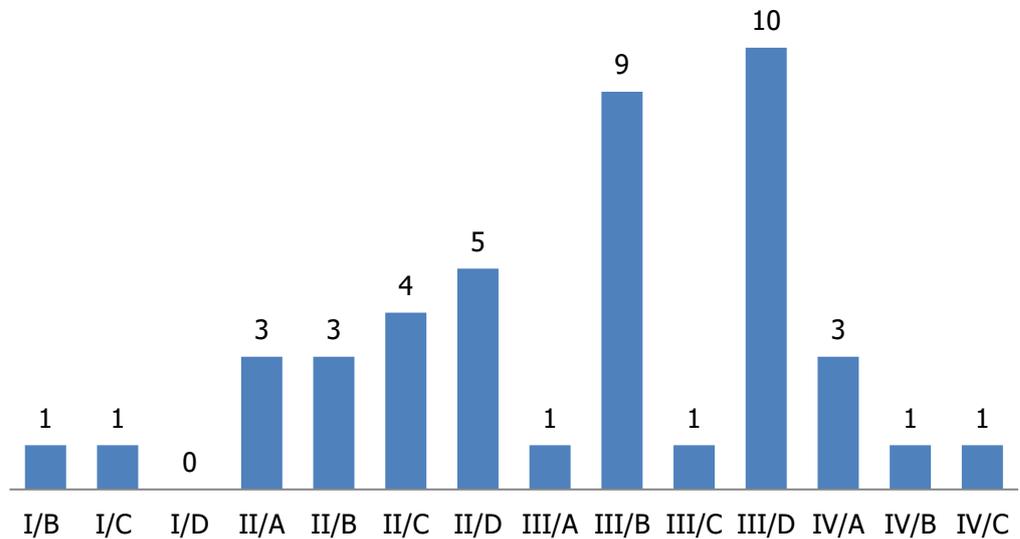
Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh berbagai sumber daya seperti Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana pelayanan serta unit usaha yang masih operasional. Berikut ini akan disampaikan uraian terkait sumber daya - sumber daya sebagai Input dalam pelaksanaan tugasnya.

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sebagai sebuah organisasi, sumber daya manusia merupakan modal yang sangat penting yang menentukan perkembangan organisasi ke arah yang lebih baik. Demikian pula dengan Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo yang keseluruhan pegawainya merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Jumlah pegawai pada Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo menurut data kepegawaian per Januari 2018 adalah berjumlah 42 orang PNS. Ditinjau dari pangkat/golongan, tingkat pendidikan, dan jabatan maka kondisi aparatur Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

**a. Data Pegawai Berdasarkan Golongan**

Jumlah pegawai pada Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo menurut data kepegawaian berjumlah 42 orang. Berdasarkan golongan kepangkatan, terlihat bahwa sebagian besar pegawai di Dinas Perikanan mempunyai golongan yang cukup tinggi. Banyaknya pegawai dengan golongan ruang III/D tercatat sebanyak 10 orang, diikuti oleh golongan ruang III/B sebanyak 9 orang, dan golongan II/D sebanyak 5 orang dan III/A sebanyak 4 orang. Banyaknya pegawai berdasarkan golongan disajikan dalam Gambar 2.2 di bawah ini:

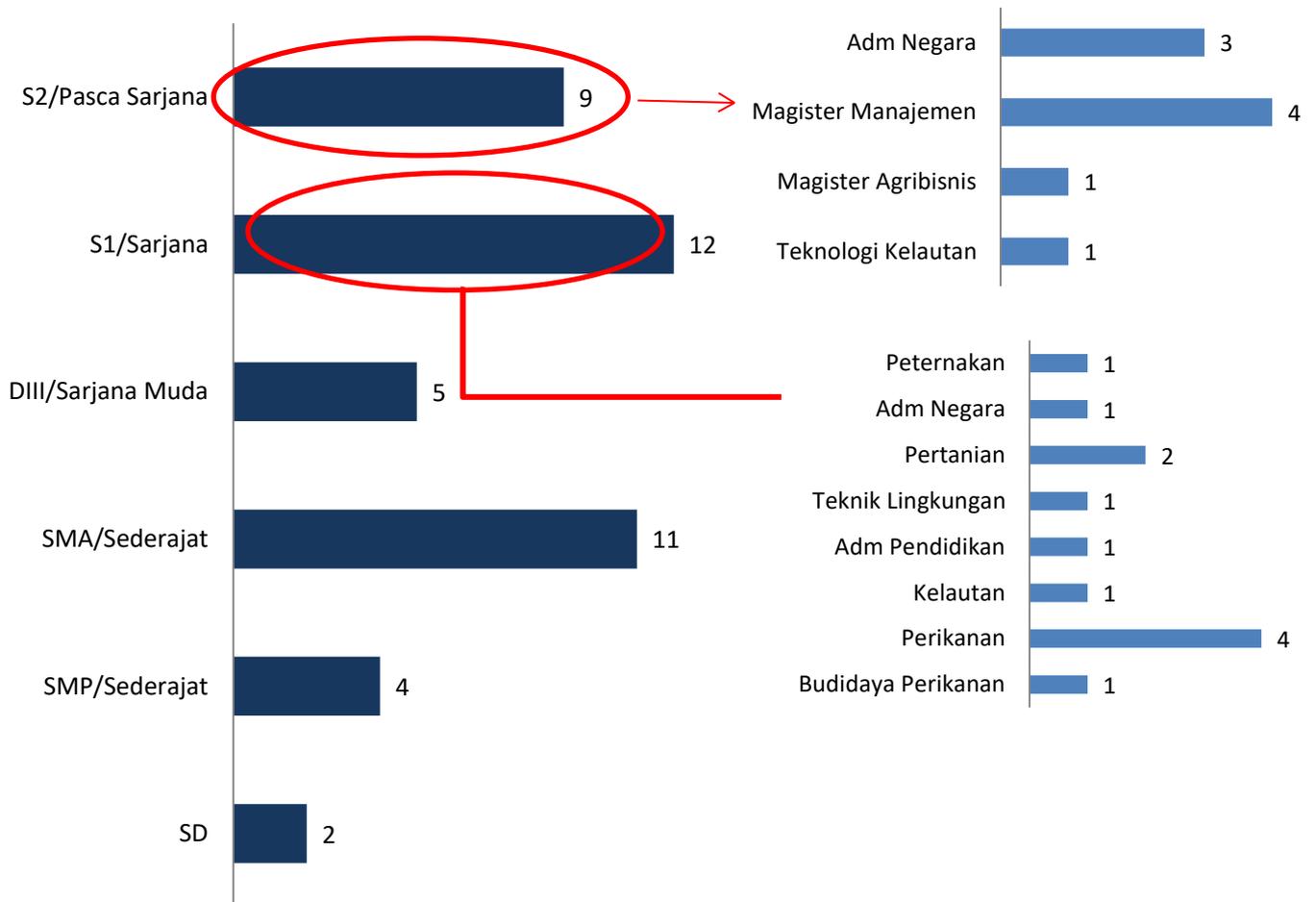


Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo 2019

**Gambar 2.2**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan**

**b. Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Ditinjau berdasarkan tingkat pendidikan, terlihat bahwa rata rata pegawai memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Banyaknya pegawai berdasarkan tingkat pendidikan disajikan dalam Gambar 2.3 di bawah ini:



Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo 2019

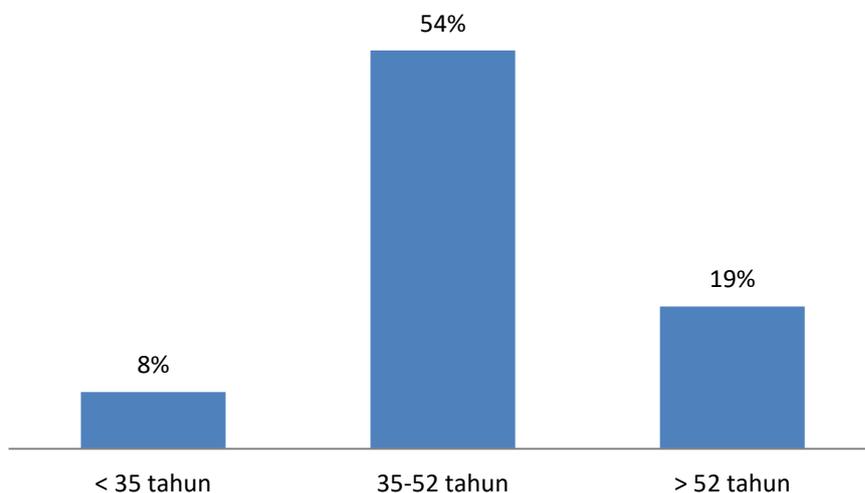
**Gambar 2.3**

**Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Tingkat pendidikan yang paling banyak adalah S1/Sarjana dan SMA sebanyak 12 orang diikuti oleh tingkat pendidikan S2 sebanyak 8 orang. Tingkat pendidikan pegawai telah sesuai dengan beban kerja pegawai OPD

**c. Data Pegawai Berdasarkan Usia**

Sedangkan jika ditinjau berdasarkan usia, penggolongan usia dibagi menjadi 3 kelompok yakni kurang dari 35 tahun, 35-52 tahun dan lebih dari 52 tahun. Untuk pegawai dengan usia 35-52 tahun termasuk dalam kategori pegawai dalam usia produktif. Berdasarkan gambar jumlah pegawai berdasarkan usia, diketahui bahwa sebesar 54% pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo termasuk dalam usia produktif.



*Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo 2019*

**Gambar 2.4**

**Data Pegawai Berdasarkan Usia**

Kesimpulan yang dapat diambil pada gambaran sumber daya manusia Dinas Perikanan adalah jumlah pegawai dengan usia produktif 35-52 tahun secara kualitas memiliki tingkat pendidikan yang tinggi yakni S1 dan S2. Selain itu pendidikan yang ditempuh juga liner yakni perikanan, kelautan, budidaya perikanan dan lingkungan. Namun personil di bidang produksi budidaya dan bidang pengolahan memiliki latar belakang pendidikan yang bukan perikanan sehingga perlu adanya pelatihan aparatur yang diberikan untuk menunjang kinerja.



## 2. Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran yang menunjang terhadap upaya pencapaian sasaran. Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo terangkum pada Tabel 2.1.

**Tabel 2.1**  
**Sarana dan Prasarana Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo**

SARANA	JUMLAH	KONDISI	PRASARANA	JUMLAH	KONDISI
Posikandu	1 unit	Baik	Speedboat	2 unit	Baik
Kantor	1 unit	Baik	Perahu Kayu	1 unit	Baik
Ruang Pertemuan	2 unit	Baik	Mobil Dinas	5 unit	Baik
Bangunan Depo	1 unit	Baik	Sepeda Motor Dinas	12 unit	Baik
Pusat Pendaratan Ikan (PPI) & Dermaga	9 unit	Baik			
Pasar Olahan Ikan dan Ikan Hias	1 unit	Baik			
Outlet Olahan	2 unit	Baik			
Balai Benih Ikan (BBI)	1 unit	Baik			
Cold Storage	2 unit	Baik			
Rumah Kemasan	1 unit	Baik			
Tambak Dinas	18,5 Ha	Baik			
Kolam Pancing	3 Lokasi	Baik			
Alat Laboratorium	52 jenis	Baik			
Bronjong	34 unit	Baik			
Jembatan Produksi	12 unit	Baik			
Plengseng	24 unit	Baik			
Jalan Produksi	27 unit	Baik			

Berdasarkan gambaran sarana dan prasarana Dinas Perikanan diatas, dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana Dinas Perikanan dalam kondisi baik, namun jumlahnya kurang memadai. Sedangkan rincian inventarisasi sarana prasarana laboratorium ditunjukkan pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.2**  
**Inventarisasi Laboratorium Dinas Perikanan**

NO	NAMA ALAT	JUMLAH	NO	NAMA ALAT	JUMLAH	NO	NAMA ALAT	JUMLAH
1	Laminar Air Flow	1 buah	19	Pemanas Spirtus	1 buah	37	Buret	3 buah
2	Oven	1 buah	20	Botol Semprot	4 buah	38	Pipet Ukur	18 buah
3	Inkubator	1 buah	21	Mikropipet	6 buah	39	Pipet Tetes	159 buah
4	PCR Portebel	1 buah	22	Termometer	9 buah	40	Pipet Volume	4 buah
5	Elektrik Bacteria Colony Counter	1 buah	23	Pinset	8 buah	41	Batang Pengaduk	10 buah
6	Spektrometer	1 buah	24	Aluminium Foil	2 gulung	42	Tabung Reaksi	105 buah
7	Mikroskop	2 buah	25	Penjepit	5 buah	43	Slide Glass	7 kotak (50 buah/kotak)
8	Cool Box	6 buah	26	Rak Tabung Reaksi	10 buah	44	Cover Glass	5 kotak (50 buah/kotak)
9	Freezer	2 buah	27	Mortal dan Pastle	4 buah	45	Botol Sampel	20 buah
10	Autoclaf	2 buah	28	pH Meter	1 buah	46	Refraktometer	6 buah
11	Desikator	1 buah	29	pH Pen	8 buah	47	Mixer	1 buah
12	Labu Ukur	4 buah	30	pH Tanah	6 buah	48	Kertas Lakmus	3 pak
13	Gelas Beaker	14 buah	31	DO meter	2 buah	49	Kertas Saring	0
14	Erlenmeyer	14 buah	32	Lup	4 buah	50	Showcase	2 buah
15	Gelas Ukur	15 buah	33	Cawan Porselin	2 buah	51	Kulkas	2 buah
16	Labu Destilasi	2 buah	34	Spatula Porselin	2 buah	52	Timbangan Analik	2 buah
17	Kaki Tiga	5 buah	35	Cawan Petri	38 pasang			
18	Kawat Kasa	5 buah	36	Corong	6 buah			

### 3. Sumber Daya Lainnya

Unit usaha yang masih operasional pada Dinas Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

#### a. Pusat Pendaratan Ikan (PPI)

Pusat Pendaratan Ikan adalah pelabuhan khusus yang merupakan pusat pengembangan ekonomi perikanan, baik dilihat dari aspek produksinya maupun aspek pemasarannya. Dengan demikian maka Pusat Pendaratan Ikan merupakan prasarana ekonomi yang berfungsi sebagai penunjang bagi perkembangan usaha perikanan laut maupun pelayaran. Pada tahun 2016, 10 Pusat Pendaratan Ikan (PPI) yang terdapat di Kabupaten Sidoarjo tersebar dalam 5 kecamatan yakni kecamatan Sedati, Buduran, Candi, Tanggulangin, Waru dan Sidoarjo.

**Tabel 2.3**

**Daftar Pusat Pendaratan Ikan Tahun 2018**

No	PUSAT PENDARATAN IKAN	LOKASI	JENIS KONSTRUKSI	PANJANG	KAPASITAS PERAHU
1	PPI DESA TAMBAK OSO	DESA TAMBAK OSO KEC.WARU	Kayu & Beton	25 M	± 60
2	PPI DESA SEGORO TAMBAK	DESA SEGORO TAMBAK KEC.SEDATI	Beton	6 M	± 15
3	PPI DESA BANJAR KEMUNING	DESA BANJAR KEMUNING KEC.SEDATI	Beton	25 M	± 25
4	PPI JUANDA	DESA GISIK CEMANDI KEC.SEDATI	Beton	50 M	± 80
5	PPI DESA GISIK CEMANDI	DESA GISIK CEMANDI KEC.SEDATI	Beton	40 M	± 40
6	PPI DUSUN KEPETINGAN	DUSUN KEPETINGAN DESA SAWOHAN KEC.BUDURAN	Beton	20 M	± 20
7	PPI DESA BLURU KIDUL	DESA BLURU KIDUL KEC.SIDOARJO	Beton	20 M	± 25
8	PPI DESA PENATARSEWU	DESA PENATARSEWU KEC.TANGGULANGIN	Beton	12 M	± 20
9	PPI DESA BALONGGABUS	DESA BALONGGABUS KEC.CANDI	Beton	10 M	± 15
10	PPI DESA BALONGDOWO	DESA BALONGDOWO KEC.CANDI	Beton	15 M	± 20

Sumber : Dinas Perikanan, 2019

**b. Tambak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo**

Pemerintah mengembangkan tambak sebagai tempat percontohan untuk budidaya udang dan bandeng dengan menggunakan teknologi plus/semi intensif. Dalam mengembangkan budidaya tersebut pemerintah Kabupaten Sidoarjo memiliki aset berupa tambak. Terdapat 3 tambak di Kabupaten Sidoarjo, diantaranya pada Kecamatan Sidoarjo, Candi dan Sedati. Luas tambak aset pemkab sekitar 18,6 ha. Berikut merupakan sebaran tambak pemerintah di Kabupaten Sidoarjo.

1. Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo seluas 11 ha.
2. Desa Kedung Peluk, Kecamatan Candi seluas 6 ha.
3. Desa Banjar Kemuning, Kecamatan Sedati seluas 1,6 ha.

**c. Depo Pemasaran Ikan**

Depo Pemasaran Ikan merupakan fasilitas Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang berdiri di atas lahan ±3 ha, 14 (empat belas) borg ikan dan pasar ikan segar. Depo Pemasaran ikan ini terletak di Jalan Lingkar Timur. Perputaran produksi ikan di Depo Pemasaran Ikan dapat mencapai 10-15 ton/hari. Depo Pemasaran Ikan ditujukan untuk:

- a. Mempertahankan mutu ikan;
- b. Meningkatkan minat beli dari masyarakat;
- c. Meningkatkan pendapatan petani/nelayan;
- d. Meningkatkan pendapatan asli daerah;
- e. Meningkatkan nilai tambah produk perikanan;
- f. Memanfaatkan sumber daya perikanan.

**2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo**

Kinerja pelayanan perangkat daerah yakni Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo digambarkan dalam realisasi kinerja terhadap target

pada renstra periode sebelumnya, serta realisasi atau penyerapan anggaran Dinas Perikanan pada periode sebelumnya.

**Tabel 2.4**  
**Capaian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011-2015**

No	Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan	Target Renstra OPD pada tahun-					Realisasi Capaian pada tahun-					Rasio Capaian pada tahun-				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	Terpeliharanya sarana budidaya perikanan dengan rehabilitasi saluran tambak															
	a. Luasan rehabilitasi saluran tambak (Ha)	8.933	-	-	194.455	53.280	25.710	53.064	111.878	194.455	53.280	288%	-	-	100%	100%
	b. Jumlah lokasi	-	-	-	146	40	76	94	84	146	40	-	-	-	100%	100%
2	Meningkatnya produksi perikanan															
	a. Meningkatkan produksi perairan (kolam) (kg)	3.214.800	3.360.400	3.969.500	4.140.000	4.636.800	4.368.400	7.591.500	15.549.000	18.377.900	18.132.000	136%	226%	392%	444%	391%
	b. Meningkatkan produksi perairan tangkap (perairan umum) (kg)	383.700	395.200	410.100	422.400	430.800	329.500	381.300	383.780	449.280	521.710	86%	96%	94%	106%	121%
	c. Meningkatkan produksi perikanan tangkap (laut) (kg)	13.150.500	13.414.500	13.682.800	13.819.600	13.975.800	12.814.600	12.881.800	14.659.569	14.828.000	14.898.400	97%	96%	107%	107%	107%
3	Meningkatnya produksi hasil tambak (kg)	52.130.900	-	-	83.421.000	91.763.200	56.373.800	59.952.300	70.887.300	77.223.800	75.085.800	108%	-	-	93%	82%

No	Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan	Target Renstra OPD pada tahun-					Realisasi Capaian pada tahun-					Rasio Capaian pada tahun-				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
	Tingkat produktivitas															
	a. Udang windu (kg/Ha)	244	251	257	263	270	243	252	254	259	274	100%	100%	99%	98%	101%
	b. Bandeng (kg/Ha)	1.549	1.821	2.173	2.534	2.661	1.500	1.750	2.000	2.225	2.181	97%	96%	92%	88%	82%
4	Tingkat konsumsi ikan/ perkapita/ tahun	25,80	26,10	26,75	27,25	27,87	27,09	27,71	27,82	28,04	28,39	105%	106%	104%	103%	102%
5	Terciptanya sistem pengolahan pemasaran produk															
	a. Jumlah desa yang mendapat pembinaan	-	-	-	90	90	15	15	40	90	95	-	-	-	100%	106%
	b. Jumlah peserta	-	-	-	2.920	3.100	50	1.450	2.000	2.920	3.100	-	-	-	100%	100%
6	Terciptanya kawasan konservasi kawasan pesisir															
	a. Jumlah benih mangrove	10.000	500	-	13.000	13.000	10.000	500	24.500	13.000	13.000	100%	100%	-	100%	100%
	b. Luas areal penanaman (Ha)	-	-	-	2	2	1	0,0007	2	2	2	-	-	-	100%	100%

Berdasarkan Tabel 2.4 dapat diketahui bahwa Capaian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut :

**1. Terpeliharanya sarana budidaya perikanan dengan rehabilitasi saluran tambak**

Indikator ini menggambarkan upaya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam memelihara sarana budidaya perikanan dengan rehabilitasi saluran tambak. Pada Tahun 2015, terlihat bahwa rasio luasan rehabilitasi dan jumlah lokasi saluran tambak mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian yang dilakukan selama tahun 2015 sudah memenuhi target yang direncanakan.

**2. Meningkatnya produksi perikanan**

Pada tahun 2015, terlihat bahwa rasio produksi perikanan di perairan kolam, umum, dan laut memiliki nilai rata-rata lebih dari 100%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2015 dalam meningkatkan produksi perikanan jauh lebih baik dan melebihi target yang direncanakan.

**3. Meningkatnya produksi hasil tambak**

Peningkatan produksi hasil tambak sesuai dengan RPJMD ditargetkan sebanyak 91.763.200 kg, dan ternyata realisasinya sebanyak 75.085.800 kg atau dengan kata lain rasio capaian hanya sebesar 82%. Salah satu penyebab menurunnya produksi hasil tambak adalah tingkat produktivitas ikan bandeng yang hanya 82%, sedangkan untuk udang windu tingkat produktivitasnya tidak kurang dan tidak melebihi target yang ditentukan yaitu 100%.

#### **4. Tingkat konsumsi ikan/ perkapita/ tahun**

Pada Tabel 2.5 terlihat bahwa rata-rata rasio capaian tingkat konsumsi ikan dari tahun ke tahun selalu melebihi target atau dengan kata lain rasio capaian lebih dari 100%. Untuk rasio capaian tingkat konsumsi ikan paling kecil terjadi pada tahun 2015 yaitu 102%, sedangkan rasio capaian tingkat konsumsi ikan paling besar terjadi pada tahun 2012 yaitu 106%.

#### **5. Terciptanya sistem pengolahan pemasaran produk**

Indikator ini menggambarkan upaya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menciptakan sistem pengolahan pemasaran produk dengan melakukan pembinaan di beberapa desa. Pada Tahun 2015, terlihat bahwa jumlah desa yang mendapatkan pembinaan melebihi target RPJMD yang telah ditentukan yaitu sebesar 106% dengan rincian 95 desa dan jumlah peserta sebesar 3.100 orang.

#### **6. Terciptanya kawasan konservasi kawasan pesisir**

Secara umum, rata-rata capaian realiasi konservasi kawasan pesisir mencapai target RPJMD dengan rincian target jumlah benih mangrove yaitu 13.000 benih dan ternyata realisasinya mencapai 13.000 benih. Sedangkan target RPJMD untuk luas areal penanaman yaitu 1,5 Ha dan ternyata realisasinya juga 1,5 Ha.

Kesimpulan yang diambil berdasarkan sasaran dan indikator kinerja Dinas Perikanan tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, sebagian besar capaian kinerja Dinas Perikanan telah mencapai target. Dari 14 indikator kinerja yang dimiliki oleh Dinas Perikanan, terdapat 5 indikator yang memiliki realisasi kinerja melebihi target yang telah ditetapkan. Rata-rata realisasi kinerja Dinas Perikanan pada tahun 2015 mencapai 122% sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Perikanan pada periode sebelumnya telah baik. Untuk indikator meningkatnya produksi hasil tambak realisasi kinerja hanya mencapai 82% karena terdapat penghambat berupa produktivitas perikanan bandeng yang turun yang disebabkan oleh penyebaran penyakit.



**Tabel 2.5**  
**Target dan Realisasi Anggaran Periode 2011-2015**

No	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 565.637.000	Rp 629.716.964	Rp 1.062.472.208	Rp 1.214.781.971	Rp 1.493.632.251	Rp 557.002.194	Rp 600.710.660	Rp 1.003.012.198	Rp 1.186.346.485	Rp 1.084.043.735	98%	95%	94%	98%	73%	29%	21%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 893.235.700	Rp 967.200.000	Rp 898.752.500	Rp 1.840.525.000	Rp 1.185.940.000	Rp 830.302.200	Rp 917.589.561	Rp 878.005.156	Rp 1.747.267.550	Rp 998.227.513	93%	95%	98%	95%	84%	18%	16%
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 8.250.000	Rp 7.590.000	Rp 8.250.000	Rp 13.500.000	Rp -	Rp 8.250.000	Rp 7.260.000	Rp 7.425.000	Rp 12.900.000	Rp -	100%	96%	90%	96%	-	-9%	-9%
4	Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Rp 76.225.000	Rp 210.516.160	Rp 264.525.000	Rp 320.100.000	Rp 100.000.000	Rp 73.871.500	Rp 204.024.000	Rp 260.358.700	Rp 308.674.500	Rp 76.790.500	97%	97%	98%	96%	77%	39%	37%
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 82.600.000	Rp 33.000.000	Rp 32.000.000	Rp 266.000.000	Rp 91.400.000	Rp 80.450.000	Rp 32.815.500	Rp 31.977.500	Rp 191.752.500	Rp 74.969.500	97%	99%	100%	72%	82%	151%	94%
6	Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	-	-	-	Rp 150.000.000	Rp 102.349.375	-	-	-	Rp 142.261.145	Rp 93.051.500	-	-	-	95%	91%	-	-
7	Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan-kawasan Konservasi Laut dan hutan	Rp 105.350.000	-	-	-	-	Rp 105.205.050	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-
8	Program Pengembangan Budaya Perikanan	Rp 838.830.000	Rp 3.382.023.000	Rp 1.333.104.500	Rp 5.091.391.000	Rp 1.965.289.750	Rp 769.138.100	Rp 3.038.057.728	Rp 1.256.747.924	Rp 4.476.422.775	Rp 1.218.469.800	92%	90%	94%	88%	62%	116%	105%
9	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Rp 250.000.000	Rp 3.970.706.910	Rp 2.514.945.000	Rp 2.322.050.000	Rp 1.449.931.875	Rp 244.608.000	Rp 3.765.465.613	Rp 2.461.380.000	Rp 2.247.645.225	Rp 1.310.241.350	98%	95%	98%	97%	90%	352%	339%
10	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Rp 1.580.794.300	Rp 2.889.081.566	Rp 4.327.811.212	Rp 6.158.238.500	Rp 6.191.614.010	Rp 1.447.879.900	Rp 2.603.578.304	Rp 4.219.950.546	Rp 5.783.442.695	Rp 5.492.292.668	92%	90%	98%	94%	89%	44%	43%
11	Program Optimalisasi Sarana dan Prasarana Budidaya	Rp 10.230.941.800	Rp 16.836.080.964	Rp 29.551.699.700	Rp 80.972.526.720	Rp 38.298.457.607	Rp 8.869.944.000	Rp 16.114.728.406	Rp 29.651.380.686	Rp 79.491.136.650	Rp 37.525.899.860	87%	96%	100%	98%	98%	65%	70%
12	Program Perlindungan dan Konservasi Kawasan Pesisir	Rp 155.000.000	Rp 473.457.000	Rp 784.918.400	Rp 251.050.000	Rp 266.475.000	Rp 149.613.000	Rp 449.878.800	Rp 749.715.700	Rp 248.269.768	Rp 257.966.000	97%	95%	96%	99%	97%	52%	51%

No	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
13	Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Kelautan Perikanan	Rp 142.525.000	Rp 254.000.000	Rp 189.050.000	-	-	Rp 135.487.000	Rp 250.960.950	Rp 182.454.500	-	-	95%	99%	97%	-	-	-	-
14	Program Perlindungan dan Pelestarian Sumberdaya Kelautan dan perikanan	Rp 266.843.000	Rp 246.230.000	Rp 156.807.000	Rp 176.875.000	Rp 192.678.500	Rp 256.475.000	Rp 240.342.800	Rp 156.768.000	Rp 175.319.200	-	96%	98%	100%	99%	0%	-6%	-32%
15	Program Pengembangan Pengelola Tambak dan Hasil Tambak	Rp 269.010.000	Rp 417.237.000	Rp 724.746.000	Rp 500.000.000	Rp 259.641.600	Rp 263.746.000	Rp 413.214.950	Rp 718.139.750	Rp 420.581.300	Rp 72.303.000	98%	99%	99%	84%	28%	12%	2%
16	Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan laut	-	-	-	Rp 308.950.000	Rp 349.056.500	-	-	-	Rp 303.901.000	Rp 296.104.800	-	-	-	98%	85%	-	-

Sumber : Dinas Perikanan, 2018

Berdasarkan tabel 2.5 diketahui bahwa pendanaan Dinas Perikanan pada tahun 2015 mengalami penurunan pendanaan hingga mencapai 48%, tetapi Dinas Perikanan tetap memaksimalkan kinerja untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Dalam segi penyerapan anggaran, dari 16 program pada rencana strategis periode sebelumnya, rasio antara realisasi penyerapan anggaran dan anggaran masih kurang baik karena rata-rata realisasi penyerapan anggaran selama tahun 2011 hingga 2015 hanya 46%.

Kurangnya penyerapan anggaran Dinas Perikanan dapat dikarenakan berbagai faktor, antara lain:

- a. Kurangnya sumber daya manusia khususnya Tenaga ahli dibidang Kelautan dan Perikanan.
- b. Kurang terpadunya kegiatan Dinas dengan instansi terkait.
- c. Adanya regulasi terkait pembagian kewenangan antara DKP Provinsi dan Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo.

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo**

Dalam rangka pengembangan pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo dibutuhkan analisis tantangan organisasi yang dimiliki oleh Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo guna memetakan strategi yang nantinya dipergunakan oleh organisasi. Berikut adalah peluang yang dimiliki oleh Dinas Perikanan sesuai tupoksi yang dimiliki:

- a. Adanya dukungan Pemerintah Nasional dan Provinsi dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk kebijakan untuk mengintegrasikan sistem perencanaan pembangunan di daerah, khususnya di bidang perikanan.
- b. Potensi sumber daya perikanan tangkap maupun budidaya dan pesisir yang cukup besar.

- c. Peluang pengelolaan Depo Pasar Ikan di Lingkar Timur Sidoarjo secara professional agar ikan Sidoarjo tidak keluar daerah Sidoarjo sehingga memberikan kontribusi PAD atas pengelolaan tersebut.
- d. Masih maraknya penggunaan alat tangkap ikan yang tidak sesuai dengan aturan Dinas Perikanan.
- e. Kesadaran masyarakat kawasan pesisir dan pengguna laut yang masih rendah terhadap Perlindungan dan Pelestarian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
- f. Belum tersedianya perencanaan pengembangan wilayah pesisir yang baik.
- g. Semakin berkurangnya kapasitas SDM pengelola tambak dan hasil tambak.
- h. Masih rendahnya kesadaran pengolah perikanan untuk mengurus Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP).
- i. Masih rendahnya kesadaran petambak akan pentingnya menguji kualitas ekosistem tambak.

# **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

### **DINAS PERIKANAN**

### **BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo**

Seperti yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, dalam menjalankan tugas dan fungsi, maupun kinerja pada periode sebelumnya permasalahan yang dialami oleh Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo adalah :

1. Sarana prasarana/fasilitas perkantoran untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat maupun dalam mendukung tugas - tugas intern Dinas dalam kondisi baik, namun jumlahnya kurang memadai.
2. Produksi perikanan tangkap (Perairan Umum) cenderung stagnan di kisaran 383,780 kg maka diperlukan peningkatan SDM nelayan agar memiliki kapasitas meningkatkan nilai tambah hasil produksinya.
3. Belum optimalnya sosialisasi kepada nelayan untuk menerapkan sistim penangkapan atau budidaya yang tidak merusak lingkungan.
4. Belum tersedianya data yang memadai karena masih belum optimalnya sistem informasi basis data terutama data saluran tambak.

### **3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Berdasarkan Visi Kabupaten Sidoarjo yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 - 2021 adalah:

#### **“Kabupaten Sidoarjo Yang Inovatif, Mandiri, Sejahtera, Dan Berkelanjutan”**

Mengacu pada Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan dokumen RPJPD Sidoarjo tahun 2006 – 2025 menjadi panduan dalam penyusunan RPJMD bagi Kepala Daerah terpilih 2016 – 2021 yang selanjutnya dijabarkan dalam misi Bupati/Wakil Bupati terpilih.

Adapun Misi Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

Unsur Visi “Mandiri” dibreakdown menjadi dua misi yaitu;

- 1) Pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipasif dan transparan, dan
- 2) Meningkatnya perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis Industri pengolahan, pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM dan Koperasi serta pemberdayaan masyarakat.

Unsur Visi “Sejahtera” dibreakdown pada dua misi yaitu;

- 3) Meningkatnya kualitas dan standar pelayanan Pendidikan dan kesehatan, dan
- 4) Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berakhlakul Karimah, berlandasan keimanan kepada Tuhan YME, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman, dan ketertiban.

Kemudian unsur visi “Berkelanjutan” memiliki satu misi yaitu;

- 5) Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Terhadap Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 – 2021 serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, maka fungsi dan tugas Dinas Perikanan terkait erat dengan pencapaian misi kedua yaitu

**“Meningkatnya Perekonomian Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Basis Industri Pengolahan, Pertanian, Perikanan, Pariwisata, UMKM Dan Koperasi Serta Pemberdayaan Masyarakat.**

Dengan tujuan RPJMD :

**“ Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berdaya Saing ”**

Untuk mencapai Misi dan tujuan tersebut sasaran RPJMD yang mendukung adalah:

**“ Meningkatkan Pendapatan Perkapita Masyarakat”**

Atas dasar Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tersebut Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo dalam menetapkan Tujuan dalam Renstra OPD Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo adalah :

**“ Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan “**  
dengan Indikator : **“Kontribusi Sub Sektor Perikanan Pada PDRB”**

### **3.3 Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan**

Sesuai Tujuan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional yakni :

1. Meningkatkan Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan
2. Mengembangkan Sistem Perkarantinaan Ikan, Pengendalian Mutu, Keamanan Hasil Perikanan, Dan Keamanan Hayati Ikan
3. Meningkatkan Keberlanjutan Usaha Perikanan Tangkap Dan Budidaya
4. Meningkatkan Daya Saing Dan Sistem Logistik Hasil Kelautan Dan Perikanan
5. Mengembangkan Kapasitas SDM Dan Pemberdayaan Masyarakat
6. Mengembangkan Inovasi IPTEK Kelautan Dan Perikanan

Memiliki sasaran Strategis:

1. Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan Dan Perikanan
2. Terwujudnya Kedaulatan Dalam Pengelolaan SDKP
3. Terwujudnya Pengelolaan SDKP Yang Partisipatif, Bertanggung Jawab Dan Berkelanjutan
4. Terselenggaranya Tata Kelola Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Yang Adil, Berdaya Saing Dan Berkelanjuta

### **3.4 Telaah Renstra Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur**

Rumusan visi dan misi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur dijabarkan kedalam 4 (empat) sasaran pembangunan yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Kelas Kelompok Perikanan Dan Kelautan
2. Meningkatnya Produksi Perikanan Dan Kelautan
3. Meningkatnya Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan Dan Kelautan
4. Meningkatnya Pemulihan Dan Perlindungan Wilayah Pesisir

Apabila diperhatikan sasaran umum Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dinas Perikanan dan Kelautan Daerah Provinsi Jawa Timur tersebut, Urusan perencanaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo pada dasarnya bersejajar dan saling mendukung untuk tercapainya misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

### **3.5 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Sesuai dengan Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, dalam pasal 32 disebutkan bahwa: (1) Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang, beserta pembiayaannya yang didasarkan atas tata ruang dan (2) Pemanfaatan ruang ini diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pelaksanaan program pembangunan yang berwawasan lingkungan atau berkaitan dengan penggunaan ruang harus disesuaikan dan disinkronisasikan dengan tata ruang yang telah ditetapkan. Undang-undang Nomer 26 tahun 2007 menggariskan bahwa bagian Pelaksanaan program pemanfaatan ruang merupakan aktivitas pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat untuk mewujudkan rencana tata ruang wilayah dan untuk mewujudkan rencana tata ruang wilayah dimaksud, diperlukan program yang bersumber dari Pemerintah, masyarakat dan swasta.

Program yang bersumber dari pemerintah, umumnya melalui mekanisme perencanaan antara lain melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Indikasi pemanfaatan ruang oleh Dinas Perikanan yang sesuai dengan RT/RW Kabupaten Sidoarjo adalah :

- a. Program pengaturan penguasaan dan pemanfaatan areal budidaya tambak
- b. Program peningkatan produktivitas hasil perikanan
- c. Program pemanfaatan areal kolam air tawar
- d. Program pengembangan usaha perikanan tangkap
- e. Program pengembangan perikanan darat
- f. Program peningkatan standar mutu produk
- g. Program pemanfaatan teknologi tepat guna spesifikasi ramah lingkungan
- h. Program pengembangan kawasan agropolitan perikanan (KAPUK Kawasan Pengembangan Utama Komoditi Perikanan)
- i. Program pengembangan sentra pembenihan ikan

Dalam rangka mencapai visi – misi maka Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo perlu menyusun faktor penghambat dan faktor pendorongnya sebagai berikut:

**Faktor Pendorong :**

- a. Adanya upaya dan terbosan dalam pembangunan/pemeliharaan sarpras tangkap
- b. Adanya upaya penyediaan atau optimalisasi Peningkatan SDM nelayan agar memiliki kapasitas meningkatkan nilai tambah hasil produksi tangkap dan peningkatan SDM pembudidaya agar memiliki kapasitas meningkatkan nilai tambah hasil produksi budidaya
- c. Adanya upaya penyuluhan, pembinaan maupun pelatihan kepada para pengolah
- d. Adanya penyuluhan mengenai manfaat usaha perikanan berbadan hokum

**Faktor penghambat:**

- a. Belum optimalnya sarana dan prasarana tangkap
- b. Kurangnya sumber daya manusia perikanan tangkap
- c. Belum optimalnya sosialisasi kepada nelayan untuk menerapkan sistem penangkapan yang tidak merusak lingkungan
- d. Belum optimalnya sarana prasarana laboratorium, terutama ketersediaan mobil laboratorium keliling.

### **3.6 Penentuan Isu Strategis**

Berdasarkan Hasil analisis terhadap Visi Misi Bupati Sidoarjo, Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah, serta memperhatikan faktor pendorong dan penghambat, maka Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo perlu menyusun isu strategis sebagai berikut :

1. Produksi perikanan tangkap dan budidaya cenderung ysng stagnan
2. Belum efektifnya penerapan sistem penangkapan dan budidaya yang tidak merusak lingkungan
3. Belum optimalnya pengolahan hasil perikanan
4. Kompetensi pelaku industri perikanan belum memadai untuk menghadapi persaingan.

# **BAB IV**

## **TUJUAN, INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN**

### **4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Berdasarkan Visi Bupati terpilih yaitu:

**”KABUPATEN SIDOARJO YANG INOVATIF, MANDIRI, SEJAHTERA  
DAN BERKELANJUTAN”**

Mengacu pada Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan dokumen RPJPD Sidoarjo tahun 2006 – 2025 menjadi panduan dalam penyusunan RPJMD bagi Kepala Daerah terpilih 2016 – 2021 yang selanjutnya dijabarkan dalam misi Bupati/Wakil Bupati terpilih, dari lima misi

dalam RPJMD yang menjadi kewenangan dan tupoksi Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo adalah Misi kedua yaitu:

**”Meningkatnya Perekonomian Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Basis Industri Pengolahan, Pertanian, Perikanan, Pariwisata, UMKM Dan Koperasi Serta Pemberdayaan Masyarakat.”**

dengan tujuan:

**“Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berdaya Saing”**

Untuk mencapai Misi dan tujuan tersebut sasaran yang mendukung adalah:

**“ Meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat ”**

Atas dasar Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tersebut Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo dalam menetapkan Tujuan dalam Renstra OPD Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo adalah :

**“Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan ”**

Rumusan Tujuan Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo tersebut diatas mempunyai makna atau arti sebagai berikut :

- a. Mencerminkan apa yang akan dicapai oleh Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo dalam kurun waktu 2016 – 2021 dalam rangka perencanaan pembangunan yang berkualitas
- b. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas pada bidang perencanaan pembangunan
- c. Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategi
- d. Memiliki orientasi ke masa depan
- e. Menumbuhkan komitmen seluruh jajaran Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo dan juga stakeholders.

Sasaran merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sesuai tujuan yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Sesuai Tujuan yang telah ditetapkan dan tugas dan fungsi yang harus diemban dan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan, telah disusun pula Sasaran yang

akan dipergunakan sebagai landasan perencanaan/program Dinas yang ingin dicapai.

Sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo tahun 2016 -2021 adalah “ **Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan, Pembudidaya dan Pengolah**”

**Tabel 4.1**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perikanan**

Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatnya pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan	Kontribusi sub sektor perikanan pada PDRB	Meningkatnya kesejahteraan nelayan, pembudidaya dan pengolah	Persentase Peningkatan pendapatan nelayan
			- Persentase Peningkatan produksi perikanan budidaya air payau
			- Persentase Peningkatan produksi perikanan budidaya air tawar
			- Nilai tambah produksi hasil olahan perikanan krupuk udang
			- Nilai tambah produksi hasil olahan perikanan Bandeng Asap

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo diatas, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016-2021. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2021, maka Dinas Perikanan memiliki kewajiban melakukan perumusan kebijakan, koordinasi dan monitoring dan evaluasi di bidang perikanan. Urusan-urusan tersebut secara tegas telah dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi setiap komponen dilingkup Dinas Perikanan.

# **BAB V**

## **STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

### **5.1 STRATEGI DAN KEBIJAKAN OPD**

Untuk meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis perikanan, maka penyelenggaraan peningkatan produksi perikanan dan olahan perikanan melalui pendekatan. Wujud dari perencanaan pembangunan sendiri merupakan kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi untuk kepentingan pembangunan daerah.

Pembangunan merupakan proses perubahan terus menerus untuk menjadi lebih baik, sehingga terjadi keseimbangan lingkungan baru.

Perencanaan pembangunan disamping mempertimbangkan pilar ekonomi juga pilar sosial budaya dan lingkungan sebagai suatu kesatuan agar berkelanjutan. Untuk mewujudkan tujuan Dinas Perikanan Meningkatnya pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan, maka strategi yang dilaksanakan Dinas Perikanan adalah :

1. Memperkuat dan mengembangkan usaha perikanan tangkap secara efisien dan lestari.
2. Menggalakkan dan mengembangkan perikanan budidaya yang berdaya saing.
3. Meningkatkan produksi daya saing dan produk hasil perikanan.

Untuk melaksanakan strategi tersebut diatas dibutuhkan kebijakan berupa :

1. Pemberdayaan masyarakat nelayan.
2. Penerapan teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan.
3. Fasilitasi sarpras perikanan tangkap.
4. Pemberdayaan masyarakat pembudidaya.
5. Penerapan CBIB dan CBIP.
6. Pemakaian benih/bibit unggul, pakan dan pupuk.
7. Pengembangan sistem pemanfaatan lahan budidaya/pekarangan
8. Diversifikasi produk-produk olahan yang bernilai tinggi
9. Pemberdayaan Poklamsar
10. Menumbuhkan UKM hasil pengolah perikanan
11. Penguatan kelembagaan bagi UMKM

**Tabel 5.1**

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perikanan Tahun 2016 - 2021**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan	Meningkatnya kesejahteraan nelayan, pembudidaya dan pengolah	1. Memperkuat dan mengembangkan usaha perikanan tangkap secara efisien dan lestari Menggalakan dan mengem bangkan perikanan budidaya yang berdaya saing 3. Meningkatkan produksi daya saing dan produk hasil perikanan	a. Pemberdayaan masyarakat nelayan b. Penerapan teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan c. Fasilitasi sarpras perikanan tangkap d. Pemberdayaan masyarakat pembudidaya e. Penerapan CBIP/CBIB f. Pemakaian benih/bibitunggul, pakan dan pupuk g. Pengembangan sistem pemanfaatan lahan budidaya/pekarangan h. Diversifikasi produk-produk olahan yang bernilai tinggi i. Pemberdayaan POKLAHSAR j. Menumbuhkan UKM hasil pengolahan perikanan k. Penguatan kelembagaan bagi UMKM

# **BAB VI**

## **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Penyusunan Program dan Kegiatan Dinas Perikanan selain berpedoman pada Peraturan menteri Dalam Negeri Nomer 13 Tahun 2006 dan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 59 Tahun 2007, dilakukan penyesuaian sesuai dengan perkembangan dan kondisi di lapangan (existing) terdiri dari 5 program Kesekretariatan dan 3 program Teknis Perikanan yaitu : Program Peningkatan Produksi ikan dan Pengawasan Perikanan Tangkap, Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya, dan Program Pengolahan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan. Pada masing-masing program tersebut mencakup beberapa kegiatan baik yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi ataupun Pemerintah Kabupaten yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perikanan, perlu dilakukan kebijakan\operasional dalam bentuk program dan kegiatan yang dapat memberikan arah dan kesatuan konsep pembangunan dalam periode 2016-2021. Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan, yang meliputi :

1. Input (Masukan): Segala sesuatu yang diperlukan agar kegiatan dapat dilaksanakan, diantaranya SDM, biaya, material, waktu, teknologi,dll.

2. Output (Keluaran): Segala sesuatu berupa produk/ jasa (fisik/non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan kegiatan.
3. Outcome (Hasil): Segala sesuatu yang menghasilkan, berfungsi output kegiatan pada jangka menengah atau beberapa jauh produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
4. Benefit (Manfaat): Kegunaan suatu output yang langsung dirasakan masyarakat, atau tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.
5. Impact (Dampak): Ukuran tingkat pengaruh sosial-ekonomi, lingkungan atau kepentingan dari setiap indikator.

## **6.1 RENCANA PROGRAM**

Bentuk perwujudan untuk mendukung pembangunan Kabupaten Sidoarjo, diwujudkan dengan program dan kegiatan pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Dinas Perikanan adalah peningkatan dukungan dalam bidang perikanan. Pelaksanaan strategi dan kebijakan sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya dijabarkan dalam program dan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo, maka terjadi perubahan susunan organisasi maupun tugas fungsi Dinas Perikanan yang berlandaskan pada Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo, maka ada penyesuaian program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018 sampai dengan 2021.

1. Program Pelayanan Kesekretariatan
  - a. Penyediaan alat tulis kantor;
  - b. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
  - c. Penyediaan bahan logistik kantor;
  - d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;

- e. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
  - f. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
  - g. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
  - h. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
  - i. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
  - j. Penyediaan jasa surat menyurat;
  - k. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
  - l. Penyediaan makanan dan minuman;
  - m. Penyediaan peralatan perlengkapan kantor;
  - n. Penyediaan peralatan rumah tangga;
  - o. Rapat-rapat koordinasi luar daerah dan dalam.
2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- a. Pengadaan dan pemeliharaan mesin absensi pegawai;
  - b. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;
  - c. Pengadaan pakaian kerja lapangan beserta perlengkapannya;
  - d. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- a. Pendidikan dan pelatihan formal;
  - b. Pendidikan dan pelatihan non formal.
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- a. Pembangunan gedung kantor;
  - b. Pemeliharaan mebeleur;
  - c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
  - d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
  - e. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor;
  - f. Pengadaan kendaraan dinas/operasional;
  - g. Pengadaan meubeleur;
  - h. Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor;

- i. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.
- 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  - a. Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja OPD;
  - b. Penyusunan laporan keuangan;
  - c. Penyediaan jasa administrasi keuangan.
- 6. Program Peningkatan Produksi Ikan Dan Pengawasan Perikanan Tangkap
  - a. Pembinaan teknologi perikanan tangkap;
  - b. Pemberdayaan kelompok nelayan perikanan tangkap;
  - c. Pengawasan dan pengendalian sumber daya perairan;
  - d. Pemberdayaan masyarakat pesisir;
  - e. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perikanan tangkap.
- 7. Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
  - a. Pembinaan dan percontohan budidaya ikan;
  - b. Pengadaan sarana dan prasarana budidaya dan pemasaran perikanan;
  - c. Pengembangan sarpras dan operasional Balai Benih Ikan/BBI dan Tambak Dinas
- 8. Program Pembinaan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
  - a. Penguatan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN);
  - b. Pembinaan mutu dan diversifikasi produk olahan perikanan;
  - c. Introduksi dan promosi gemar makan ikan;
  - d. Peningkatan layanan kesehatan ikan;
  - e. Pengawasan OIKB (Obat Ikan Kimia dan Biologi);
  - f. Peningkatan kapasitas layanan lingkungan budidaya;
  - g. Monitoring dan pengujian lingkungan budidaya.

Program / Kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019  
sebagai berikut :

2. Program pelayanan Kesekretariatan
  - a. Penyediaan barang/ jasa perkantoran
  - b. Kegiatan kedinasan dalam daerah, luar daerah dan luar negeri
  - c. Pengadaan sarana dan prasarana aparatur
  - d. Pengadaan pakaian dinas aparatur
  - e. Peningkatan kapasitas aparatur
  - f. Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
  - g. Penyusunan dokumen perencanaan ,penganggaran data dan informasi PD
  - h. Monitoring dan evaluasi pelaporan kinerja PD
  - i. Penyusunan laporan keuangan
3. Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Garam
  - a. Pemberdayaan kelompok nelayan, petambak garam dan masyarakat pengawas
  - b. Pengawasan dan pengelolaan sumber daya perairan
  - c. Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perikanan tangkap
4. Program Peningkatan Produksi Perikanan budidaya
  - a. Pembinaan dan percontohan budidaya
  - b. Pengadaan sarana dan prasarana budidaya dan pemasaran perikanan
  - c. Pengembangan sarpras dan operasional BBI dan tambak dinas
  - d. Peningkatan kesehatan ikan ikan dan lingkungan budidaya
  - e. Fasilitasi Balai Benih Ikan (BBI) dan tambak dinas
5. Program Pembinaan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
  - a. Pembinaan mutu dan diversifikasi produk perikanan
  - b. Pelayanan usaha dan pemasaran hasil perikanan

Program / Kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2021 sebagai berikut :

1. Program pelayanan Kesekretariatan
  - a. Penyediaan barang/ jasa perkantoran
  - b. Kegiatan kedinasan dalam daerah, luar daerah dan luar negeri
  - c. Pengadaan sarana dan prasarana aparatur
  - d. Pengadaan pakaian dinas aparatur
  - e. Peningkatan kapasitas aparatur
  - f. Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
  - g. Penyusunan dokumen perencanaan ,penganggaran data dan informasi PD
  - h. Monitoring dan evaluasi pelaporan kinerja PD
  - i. Penyusunan laporan keuangan
2. Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Garam
  - a. Pemberdayaan kelompok nelayan, petambak garam dan masyarakat pengawas
  - b. Pengawasan dan pengelolaan sumber daya perairan
  - c. Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perikanan tangkap
4. Program Peningkatan Produksi Perikanan budidaya
  - a. Pembinaan dan percontohan budidaya
  - b. Pengadaan sarana dan prasarana budidaya dan pemasaran perikanan
  - c. Pengembangan sarpras dan operasional BBI dan tambak dinas
  - d. Peningkatan kesehatan ikan ikan dan lingkungan budidaya
  - e. Fasilitasi Balai Benih Ikan (BBI) dan tambak dinas
5. Program Pembinaan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
  - a. Pembinaan mutu dan diversifikasi produk perikanan
  - b. Pelayanan usaha dan pemasaran hasil perikanan
  - c. Pengelolaan Depo Ikan



**Tabel 6.2**  
**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**  
**Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021**

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/kegiatan	Sasaran Program/kegiatan	Indikator program/kegiatan	Tahun dasar	Target kinerja program/kegiatan dan kerangka pendanaan												Kondisi kinerja pada akhir periode renstra		
							2016		2017		2018		2019		2020		2021				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Meningkatnya pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan	Meningkatnya kesejahteraan nelayan, pembudidaya dan pengolahan	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perikanan	Program pelayanan administrasi perkantoran		Tingkat kepuasan aparatur OPD terhadap pelayanan administrasi perkantoran				82 %	1.470.411.389	82 %	1.488.639.108	84 %	1.494.366.929,60	86 %	1.501.240.315,52	88 %	1.511.688.378,62	88 %	1.521.688.378,62	Se kre tari s
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22











			Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya jamuan makan minum	Jumlah makan minum yang disediakan	170 kotak	170 kotak		170 kotak	5.000.000	12 bulan	7.450.000	12 bulan	8.195.000	12 bulan	9.014.000	12 bulan	9.915.950.	12 bulan	9.915.950	Ka su bb ag um da n ke pe ga wai an
			Penyediaan jasa admiinstrasi keuangan	Tertibnya pengelolaan administrasi keuangan kantor	Jumlah pejabat dan staf administrasi keuangan	22 orang	22 orang		22 orang	220.368.228	22 orang	163.914.108	22 orang	164.000.000	22 orang	165.400.000	22 orang	166.440.000	22 orang	166.440.000	

			Kegiatan kedinasan dalam daerah, luar daerah dan luar negeri	Terlaksananya koordinasi, konsultasi dan kegiatan dinas lainnya	Jumlah rapat koordinasi dalam daerah yang dilaksanakan	12 bulan	12 bulan		12 bulan	307.500.000	12 bulan	582.341.881	12 bulan	583.341.881	12 bulan	584.341.881	12 bulan	585.341.881	12 bulan	586.341.881	Kasubbag umum dan kepegawaian
					Jumlah rapat koordinasi luar daerah yang dilaksanakan	12 bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan	12 bulan	Kasubbag umum dan kepegawaian								





			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya aparatur yang terlatih di bidang teknis dan fungsional	Tingkat kelulusan peserta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang dikirim dan bersertifikat					90 %	101.225.000			90 %	101.225.000	91 %	121.470.000	92 %	145.764.000	93 %	174.916.800	93 %	174.916.800	174.916.800	Se kretaris
			Pendidikan dan pelatihan non formal	Meningkatnya pendidikan dan pelatihan non formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan non formal	54 orang	54 orang			54 orang	101.225.000			54 orang	101.225.000	54 orang	121.470.000	54 orang	145.764.000	54 orang	174.916.800	54 orang	174.916.800	174.916.800	Kasubag umum dan kepegawaian

			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Sarana dan prasarana kantor yang memadai	% sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi				85 %	277.350000	100 %	347.100.000	100 %	348.100.000	100 %	349.120.000	100%	350.100.000	100%	350.100.000	sekreteris
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharaan ya gedung kantor	Jumlah unit gedung yang dipelihara				4 unit	376.400.000	4 unit	277.350.000	5 unit	288.800.000	5 unit	292.920.000	5 unit	303.504.000	5 unit	303.504.000	Kasubbag umum dan kepegawaian

			Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara					2 kendaraan	40.000.000								6 kendaraan	22.500.000	6 kendaraan	27.000.000	6 kendaraan	32.000.000	6 kendaraan	38.880.000	6 kendaraan	38.880.000	Kasubbag umum dan kepegawaian
			Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor	Terpeliharaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara														5 jenis	24.000.000	5 jenis	40.000.000	5 jenis	96.000.000	5 jenis	100.000.000	5 jenis	100.000.000	Kasubbag umum dan kepegawaian

			Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan dan peralatan gedung kantor	Jenis dan jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang diadakan		3 jenis			3 jenis	125.400.000		3 jenis	23.250.000	3 jenis	24.800.000	3 jenis	25.560.000	5 jenis	26.472.000	5 jenis	26.472.000	Kasubbag umum dan kepegawaian
			Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya akuntabilitas aparatur	% jumlah dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja OPD yang tepat waktu		100 %			100 %	446.555.772		100 %	72.100.000	100 %	86.520.000	100 %	103.824.000	100 %	124.588.800	100 %	124.588.800	sekretaris



		% pening katan pendap atan nelaya n	Program peningkatan produksi ikan dan pengawasan perikanan tangkap	Meningkatny a produksi perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap laut	14.898.400 kg	14.00.000 kg		15.050.000 kg	1.492.975.000	15.200.000 kg	667.225.500	15.400.00 kg	668.315.000	15.600.000 kg	669.378.000	15.800.000 kg	670.4.853.600	15.800.000 kg	670.4853.600	Ka bid per ika na n tan gk ap
					Jumlah produksi perikanan umum daratan	521.710 kg	525.000 kg		530.000 kg		536.000 kg		543.000 kg		550.000 kg		560.000 kg		560.000 kg		
			Pembinaan teknologi perikanan tangkap	Meningkatny a pengetahua n nelayan	Jumlah nelayan yang menerapkan hasil pelatihan				150 orang	26.000.000	9 orang	107.900.000	200 nelayan	141.480.000	200 nelayan	169.776.000	200 nelayan	203.731.200	200 nelayan	203.731.200	Ka si pe mb erd aya an nel ayan tan gk ap

			Pemberdayaan kelompok nelayan perikanan tangkap	Meningkatnya pengetahuan kelompok nelayan dan masyarakat pesisir	Jumlah nelayan yang menerapkan hasil pelatihan				350 orang	1551.200.000	300 orang	456.810.500	350 orang	575.241.000	350 orang	690.289.200	350 orang	700.347.040	350 orang	700.347.040	Kasi pemberdayaan nelayan tangkap
			Pengawasan dan pengendalian sumber daya perairan	Menurunnya tingkat kerusakan dan tingkat pelanggaran pemanfaatan sumber daya perairan	Jumlah patroli di perairan	10 kali	10 kali	10 kali	10 kali	54.950.000	10 kali	55.300.000	10 kali	56.760.000	10 kali	57.312.000	10 kali	57.312.000	57.312.000	Kasi pemberdayaan nelayan tangkap	

			Pemberdayaan masyarakat pesisir	Meningkatkan pengetahuan masyarakat pesisir	Jumlah nelayan yang paham aturan	150 orang	150 orang	150 orang	150 orang	19.245.000	150 orang	20.294.000	150 orang	21.352.800	150 orang	22.623.360	150 orang	22.623.360	Kasipembudayaan nelayan tangkap
					Jenis dan jumlah hibah				4 jenis		4 jenis		4 jenis		4 jenis		4 jenis		
			Pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana perikanan tangkap	Terfasilitasi sarpras tangkap	Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	5 unit	861.825.000	5 unit	28.320.000	5 unit	36.000.000	5 unit	37.200.000	5 unit	38.840.000	5 unit	38.840.000	Kasiprasarasan tangkap	

		Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Program peningkatan produksi perikanan budidaya	Meningkatnya produktivitas perikanan budidaya	Produktivitas udang windu					8.436.240.873	334,03 kg/ha/t							9.920.655.503	9.921.655.503			9.924.655.503		9.924.655.503	Kabid produksi budidaya			
					Produktivitas bandeng						2.236,24 kg/ha/t																	
			Pembinaan dan percontohan budidaya ikan	Meningkatnya pengetahuan pembudidaya	Jumlah pembudidaya ikan yang menerapkan hasil pelatihan					490.450.000	200 orang							448.000.000	449.400.000				450.680.000		451.616.000		451.616.000	Kasi pemberdayaan pebudidaya

					Jumlah pembudidaya yang bersertikat CBIB					50 orang				50 orang				50 orang																				
			Pengadaan sarana dan prasarana budidaya dan pemasaran perikanan	Tersedianya benih ikan di BBI dan tambak dinas	Jumlah penjualan benih yang dihasilkan oleh BBI Benih lele					6.487.330.873	190.000 ekor		8.968.975.630			8.969.929.600				8.969.929.630					8.970.929.300											8.970.929.300	Ka si sar pra s bu did ay a	
					Jumlah penjualan ikan yang dihasilkan tambak dinas																															Ka si sar pra s bu did ay a		
					Bandeng						7.900 kg																											
					Udang						600 kg																											

			Pengembangan dan operasional balai benih ikan (BBI) dan tambak dinas	Meningkatnya hasil tambak	Jumlah hasil tambak yang dijual di Depo					853.900.000		503.679.873		504.680.873		505.680.873		506.680.873		506.680.873
					Bandeng						3.600.000 kg									
					Udang						180.000 kg									
					Benur						300.000.000 ekor									
					Nener						75.000.000 ekor									
					Nila						75.000.000 ekor									

		Nilai Tamba h Produ ksi Hasil Olahan Perika nan - Krupuk Udang - Bande e asap	Program pengolahan, kesehatan ikan dan lingkungan	Meningkany a jumlah produk hasil olahan perikanan	Jumlah produksi hasil olahan perikanan				6.180.000 kg	1.584.240.000	6.489.000 kg	2.176.371.750	6.813.450 kg	3.106.491.870	7.358.526 kg	3.110.491.870	7.947.208 kg	3.112.491.870	7.947.208 kg	3.112.491.870	Ka bid pe ng ola ha n, ke se hat an ika n da n lin gk un ga n
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	--	--	--	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			Penguatan SLIN (Sistem Logistik Ikan Nasional)	Terkelolanya stok ikan	Jumlah sarana SLIN yang diadakan				1 unit	584.240.000		1 unit	554.825.000	1 unit	554.830.000	1 unit	554.840.000	1 unit	554.848.000	1 unit	554.848.000	Kasipengolahan hasil perikanan		
			Pembinaan mutu dan diversifikasi produk hasil olahan perikanan	Meningkatnya keanekaragaman olahan ikan dan kualitas	Jumlah diversifikasi olahan ikan yang dihasilkan			5 jenis				2 jenis	837.096.000	7 jenis	838.096.000	7 jenis	839.096.000	7 jenis	840.096.000	7 jenis	840.096.000	7 jenis	840.096.000	Kasipengolahan hasil perikanan

				Jumlah olahan ikan yang memenuhi jaminan mutu	3 sertifikat															
			Introduksi & promosi gemar makan ikan	Jumlah introduksi, pameran dan roadshow	Jumlah diversifikasi olahan ikan yang dihasilkan	54 kali	55 kali	57 kali		63 kali	317.515.000	63 kali	317.515.000	65 kali	318.515.000	67 kali	319.515.000	kali	319.515.000	Kasipengolahan hasil perikanan
			Peningkatan layanan kesehatan ikan	Terfasilitasi ya pemeriksaan ikan	Jumlah jenis serangan penyakit pada ikan					2 jenis serangan	321.435.000	2 jenis serangan	322.928.000	2 jenis serangan	323.113.600	2 jenis serangan	324.136.320	2 jenis serangan	324.136.320	Kasikesahatan ikan

					Jumlah sampel ikan yang lolos uji residu						400 sampel			400 sampel			400 sampel			400 sampel			400 sampel					
			Pengawasan OIKB (obat ikan kimia dan biologi)	Menurunnya pelanggaran penggunaan OIKB yang tidak terdaftar	Jumlah toko yang menjual obat ikan yang dilarang						12 pelanggaran	6.450.000	12 pelanggaran	6.500.000	12 pelanggaran	6.501.000	12 pelanggaran	6.504.000	12 pelanggaran	6.504.000	12 pelanggaran	6.504.000						Ka si ke se hat an ika n
					jumlah pelanggaran penggunaan OIKB yang tidak terdaftar						1 toko		1 toko		1 toko		1 toko		1 toko		1 toko							

			Peningkatan kapasitas layanan lingkungan budidaya	Terfasilitasi uji kualitas air	Jumlah sampel air tambak dan kolam yang lolos uji lab	100 uji	100 uji		100 uji		100 lhu	321.435.000	100 uji	326.581.500	100 uji	327.163.000	100 uji	328.326.000	100 uji	328.326.000	Kasi lingkungan budidaya
--	--	--	---------------------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------------------------	---------	---------	--	---------	--	---------	-------------	---------	-------------	---------	-------------	---------	-------------	---------	-------------	--------------------------

**Tabel 6.3**  
**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**  
**Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021**

Tujuan	Indikator tujuan	Formulasi perhitungan	sasaran	Indikator sasaran	Formulasi Perhitungan	Program/kegiatan	Sasaran Program/kegiatan	Indikator program/kegiatan	Tahapan dasar	Target kinerja program/kegiatan dan kerangka pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung jawab			
										2016		2017		2018		2019		2020		2021			Target	Rp	
										Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Meni ngkat nya pertu mbuh an PDR B sub sekto r perik anan	Kontrib usi sub sektor perikan an pada PDRB	PDRB sub Sektor perikanan PDRB Total	Meni ngkat nya kesej ahter aan nelay an, pemb udida ya dan peng olah			Progra m pelayan an kesekre tariatan	Mening katnya kepuas an aparatu r PD terhada p pelayan an kesekre tariatan	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan keseekretariata n								84%	2.421.142.913	86%	1,105,679,840.00	86%	2.441.142.913	86%	2.451.142.913	Sekretaris	Sekretaris		
						Penyed iaan barang / jasa perkant oran	Pening katan kelanca ran pelaksa naan kant										84%	1.004.148.990	86%	866.575.200.00	84%	1.006.000.000	84%	1.007.148.990	1.0 07. 148 .99 0 %	Kasubbag Umum dan Kepegawai an	Kasubbag Umum dan Kepegaw aian

					Jumlah surat keluar masuk yang dikelola (n)		Jumlah surat keluar masuk yang dikelola								180 buah		190 buah		181 buah					181 buah											
--	--	--	--	--	------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	----------	--	----------	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar(n)		Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar							20 orang/ bulan		20 orang/ bln		20 orang/ bln		20 orang/ bln				
				jumlah BBM yang disediakan(n)		jumlah BBM yang disediakan							20.000 liter		1.920 liter		20.000 liter		1		20.000 liter		



					Jumlah jamuan rapat/tamu yang disediakan (n)				Jumlah rapat/tamu yang disediakan						220 kotak	230 kotak	240 kotak		250 kotak					
--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------	--	--	--	--------------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------	-----------	-----------	--	-----------	--	--	--	--	--





			Jumlah komponen listrik / penerangan yang tersedia		Jumlah komponen listrik / penerangan yang tersedia									8 buah		13 buah		9 buah				9 buah	

				Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan (n)		Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan																
														10,8,15,8 buah					' -10,8,15,8 buah			
																			' -			
																			' -10,8,15,8 buah			
																			' -			

					Jumlah alat tulis kantor dan penggandaan yang tersedia										38 buah		43 buah		40 buah			40 buah						
--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	---------	--	---------	--	--	---------	--	--	--	--	--	--



				Jumlah jam lembur yang terbayar (n)			Jumlah jam lembur yang terbayar										1800/jam	-	1270 jam															1800 /jam					
				Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti (n)	Kegiatan kedinas an dalam daerah , luar daerah dan luar negeri	Koordin asi, konsultasi dan kegiatan kedinasan dalam daerah, luar daerah dan luar negeri	Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti										100 %	539.250.000	100%	140.594.940.00	100%	352.049. .970		100%		453.982.500													

Jumlah luas Gedung / kantor / rumah dinas / jabatan yang direhab sedang/ berat (n)	Pengadaan sarana dan prasarna aparatur	Tersedianya sarana dan prasarna aparatur	Jumlah luas Gedung / kantor / rumah dinas / jabatan yang direhab sedang/ berat
			500 m2
			487.062.930
			-
			11,643,700.00
			500 m2
			489.062.930
			500 m2
			489.062.930

				Jumlah Gedung kantor / rumah jabat an/ dinas yang diban gun (n)			Jumlah Gedung kantor / rumah jabatan/ dinas yang dibangun								2 unit				3 unit					3 unit						
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--------	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--





					Jumlah aparatur yang dikirim mengikuti pelatihan /bimtek	Peningkatan kapasitas aparatur yang dikirim mengikuti pelatihan SDM	tingkat penyelesaian tugas setelah mengikuti pelatihan	Jumlah aparaturnya yang dikirim mengikuti pelatihan /bimtek										18 orang	101.175.000			20 orang	103.175.000	20 orang	1043.175.000
--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	-------------	--	--	----------	-------------	----------	--------------

				Juml ah peser ta yang hadir meng ikuti sosia lisasi/ semi nar (n)			Jumlah peserta yang hadir mengikuti sosialisasi/ seminar							18 orang				30 orang					35 orang					
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	-------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--

					Jumlah pakaian dinas/ kerja dan kelengkapan aparatur yang tersedia	Pengadaan pakaian dinas dan kelengkapan aparatur	Tersedianya pakaian dinas										45 buah	55.140.000										47 buah	80.182.132							47 buah	80.182.132						
--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	------------	--	--	--	--	--	--	---------	------------	--	--	--	--	--	--

				Jumlah pakaian harian-hari tertentu yang tersedia (n)			Jumlah pakaian hari-hari tertentu yang tersedia								45 buah			47 buah					47 buah										
--	--	--	--	-------------------------------------------------------	--	--	-------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					Jumlah	Pemeliharaan	terpeliharaan	Jumlah luas																	
					luas	sarana	sarana	Gedung/ kantor/rumah dinas/jabatan																	
					500 m2									500 m2											
															109.716.000										
					500 M2																				
															78.000.000										
					500 m2																				
															111.716.000										
					500 m2																				
															112.716.000										





					Jumlah Dokumen perencanaan PD yang disusun	Dimilikinya dokumen perencanaan, pengangan ggaran, data dan informasi PD	Penyusunan dokumen perencanaan, pengangan ggaran, data dan informasi PD	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun									2 dokumen	38.448.900	2 dokumen	2.990.000	2 dokumen	60.873.169	2 dokumen	60.873.169				
--	--	--	--	--	--------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	------------	--	--	--	--



					Jumlah data dan informasi yang disusun (n)			Jumlah data dan informasi yang disusun														
					Monitoring dan evaluasi laporan kinerja PD	termonitoring dan terevaluasinya pelaporan kinerja PD	Jumlah dokumen SKM yang disusun							1 dok	80.863.137	1 dok	4.376.000	1 dok	95.595.396	95.595.396	Kaubbagan Perencanaan dan Keuangan	Kaubbagan Perencanaan dan Keuangan



					Juml ah doku men lapor an kinerj a yang disus un (n)		Jumlah dokumen laporan kinerja yang disusun									1 dokumen				1 dokumen			1 dokumen						1 dokumen										
--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				Jumlah laporan keuangan yang disusun (n)	Penyusunan laporan keuangan	tertibnya penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan yang disusun									2 laporan	5.337.956	2 laporan	1.500.000	2 laporan	9.409.640	2 laporan	9.409.640	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
--	--	--	--	---------------------------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------------------	-----------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------------------------------------------	--------------------------------------------

				Proses Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Tawar	Produksi perikanan budidaya	Program peningkatan produksi perikanan budidaya	Meningkatkan jumlah produksi perikanan budidaya	Produktivitas perikanan budidaya							116.364.007.276		10.374.685.900.00		18.364.007.276		18.364.007.276	Kepala Bidang Produksi Budidaya	Kepala Bidang Produksi Budidaya
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	----------------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	-------------------	--	----------------	--	----------------	------------------------------------------	------------------------------------------



					Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang menerapkan hasil pelatihan (n)	Pembinaan dan percontohan budidaya ikan	Meningkatnya pengetahuan dan kapasitas pembudidaya ikan	Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang menerapkan hasil pelatihan							200 orang	217.442.350	2 kelompok	86.266.800,00	250 orang	2219.442.350	250 orang	Kepala Seksi Pemberdayaan Pembudidaya	Kepala Seksi Pemberdayaan Pembudidaya
--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	---------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	-------------	------------	---------------	-----------	--------------	-----------	---------------------------------------	---------------------------------------

				Jumlah pembudidaya yang bersertifikat CBIB dan CPIB (n)											20 orang		5 orang		30 orang			30 orang						
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	---------	--	----------	--	--	----------	--	--	--	--	--	--

					jumla h saran a dan prasa rana budid aya (n)	Pengad aan sarana dan prasara na budiday a	Tersedi anya sarana prasara na budiday a	Jumlah hasil tambak yang dijual di Depo Bandeng Udang									bandeng : 3.607.500 kg, Udang : 180.000 kg	15.304.772.566	bandeng 3.611.107,5, udang: 180.144 kg	9,675,304,700.00	bandeng : 3.622.500 kg, udang : 180.500 kg	17.304.772.566	bandeng : 3.622.500 kg, udang : 180.500 kg	17.304.772.566	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya	Kepala Seksi Sarana dan Prasaran a Budidaya
--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------------	----------------	----------------------------------------	------------------	--------------------------------------------	----------------	--------------------------------------------	----------------	--------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------





					Jumlah serangan penyakit pada ikan (n)			Jumlah serangan penyakit pada ikan							2 jenis serangan		5 jenis serangan		2 jenis serangan			2 jenis serangan					
--	--	--	--	--	----------------------------------------	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	--	------------------	--	--	--	--	--



					Jumlah toko yang menjual obat ikan yang dilarang (n)		Jumlah toko yang menjual obat ikan yang dilarang						25 toko		17 toko		25 toko			25 toko			
					Fasilitas Balai Benih Ikan (BBI) dan Tambak Dinas	tersedia sarana prasana BBI dan tambak Dinas	Jumlah Penjualan benih yang dihasilkan oleh BBI						125.000 ekor	410.526.000	150.000 ekor	382.335.600.00	128.000 ekor	412.526.000		128.000 ekor	412.526.000	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya



				Proses	Pendapatan	Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Garam	meningkatnya jumlah produksi perikanan tangkap dan garam	jumlah produksi perikanan laut																													Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	
								jumlah produksi perikanan tangkap, umum dan daratan																															
								Jumlah produksi garam																															

						Jumlah Nelayan yang menerapkan hasil pelatihan																Kepala Seksi Pemberday aa Nelayan Tangkap	Kepala Seksi Pemberd ayaa Nelayan Tangkap
					Jumlah dayaan kelomp an ok nelayan , petamb ak garam dan masyar akat pengaw as	mening katnya penget ahuan dan kapasit as kelomp ok Nelaya n, petamb ak garam dan masyar akat pengaw as								20 orang	118.574.100	25 orang	217.953.580.00	22 orang	120.574100	22 orang	120.574.100		

				Jumlah ah peta mbak gara m yang mene rapka n hasil pelati han (n)		Jumlah petambak garam yang menerapkan hasil pelatihan									10 orang		15 orang		17 orang						17 orang			
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	----------	--	----------	--	--	--	--	--	----------	--	--	--

				Jumlah masyarakat pengawas yang menerapkan hasil pelatihan (n)		Jumlah masyarakat pengawas yang menerapkan hasil pelatihan							10 orang		15 orang		14 orang		14 orang			
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	--	--



					Jumlah mangrove yang ditanam (n)			Jumlah mangrove yang ditanam							3.000 bibit		0		0			0			
					Jumlah bibit ikan yang ditebar (n)			Jumlah bibit ikan yang ditebar							600.000 ekor		600.000 ekor		750.000 ekor			750.000 ekor			

					Jumlah sarana dan perikanan tangkap yang diadakan dan dipelihara	tersedia sarana dan prasarana perikanan tangkap	Jumlah sarana perikanan tangkap yang diadakan dan dipelihara								2 unit	214.603.700	2 unit	24.306.000.00	2 unit	216.603.700	2 unit	216.603.700	Kepala Seksi Pengelolaan Sumber daya Ikan dan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	Kepala Seksi Pengelolaan Sumber daya Ikan dan Sarana dan Prasaran a Perikanan Tangkap
--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------	-------------	--------	---------------	--------	-------------	--------	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

				Jumlah ah prasa rana perik anan tangk ap yang diban gun dan dipeli hara (n)		Jumlah prasarana perikanan tangkap yang dibangun dan dipelihara							2 unit		10 unit		2 unit		2 unit			
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--	--

				Nilai tambah produksi olahan perikanan	Nilai Tambah = Nilai produksi olahan perikanan	Program Pembinaan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya jumlah produksi olahan perikanan	Jumlah produksi olahan hasil perikanan																Kepala Bidang Bina Usaha Perikanan
				Krupuk udang g	Nilai Produk Perikanan segar (n)											11.839.304 kg	1.569.758.100	9.500.000 kg	363.251.550.00	11.842.308 kg	1.571.758.100	11.842.308 kg	1.571.758.100	

				Nilai tambah produk olahan perikanan Bandeng Asap				jumlah kelompok pengolah dan pemasar yang mempunyai sertifikat jaminan mutu												PIRT,HALAL,MD (7)	PIRT,HALAL,MD (2)	PIRT,HALAL,MD (7)		PIRT,HALAL,MD (7)				
--	--	--	--	---------------------------------------------------	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	--	--	--	--

						Kegiatan pembinaan mutu dan diversifikasi produk olahan perikanan	keanekaragaman olahan ikan dan meningkatkan pengetahuan standar mutu	Jumlah diversifikasi olahan ikan yang dihasilkan									2 olahan hasil perikanan 113.790.785	2 olahan hasil perikanan 98.803.600.00	2 olahan hasil perikanan 115.790.785	2 olahan hasil perikanan 115.790.785		Kepala Seksi Pembinaan Usaha, Mutu dan Diversifikasi Produk
--	--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------------	-------------------------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------

					Jumlah olahan ikan yang memenuhi jaminan mutu (n)		Jumlah olahan ikan yang memenuhi jaminan mutu								7 jenis olahan		8 jenis olahan		7 jenis olahan		7 jenis olahan			

					Jumlah Pelaku Usaha yang terlayani (n)	Kegiatan Pelayanan Usaha dan Pemasaran Hasil Perikanan	Tersedia pelayanan usaha dan pemasaran	Jumlah pelaku usaha perikanan yang terlayani											220 pelaku usaha	1.455.967.315	150 pelaku usaha	102,711,950.00	220 pelaku usaha	1.457.967.315	220 pelaku usaha	1.457.967.315		Kepala Seksi Pelayanan Usaha, Promosi dan Logistik
--	--	--	--	--	----------------------------------------	--------------------------------------------------------	----------------------------------------	----------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	---------------	------------------	----------------	------------------	---------------	------------------	---------------	--	----------------------------------------------------

		/			Jumlah		Jumlah								30 produk		3 kali		30 kali		30 kali		
					ah		fasilitasi																
					fasilit		pemasaran																
					asi		hasil																
					pema		perikanan																
					saran		yang																
					hasil		dilakukan																
					perik																		
					anan																		
					yang																		
					dilak																		
					ukan																		
					(n)																		

					Jumlah bandeng kawak dengan berat > 5 Kg (n)		Jumlah bandeng kawak dengan berat $\geq$ 5 Kg									6 kg						5 ekor										0 ekor										6 ekor											Kepala Seksi Pelayanan Usaha, Promosi dan Logistik	
					Jumlah pengelolan depokan ikan yang terjual (n)	jumlah ikan yang terjual	Jumlah ikan yang terjual																6.500.000 kg	161.736.000.00	6.600.000 kg																		6.600.000 kg											Kepala Seksi Depo Ikan

**Pemutakhiran Permendagri No.90 Tahun 2019  
(Surat Bina Keuda Kemendagri tanggal 12 Oktober 2020 Nomor 050/4189/Keuda )**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah	Sasaran Program/Kegiatan	Rumus Perhitungan	Penanggung jawab	Anggaran
Nama Program			Indikator Program	Target Program					
	Nama Kegiatan		Indikator Kegiatan	Target Kegiatan					
		Nama Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan					
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>			1) Jumlah produksi perikanan laut 2) Jumlah produksi perikanan tangkap, perairan umum dan daratan; 3) Jumlah produksi garam	LAUT 15.800 TON, PUD 560 TON, GARAM 10.600 TON	Dinas Perikanan	Meningkatnya Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	$\sum$ Produksi dalam 1 Tahun = $\sum$ Produksi Jan + Feb + Mar + Apr + Mei + Jun + Jul + Agu + Sep + Okt + Nov + Des	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	633,268,782.00

	<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>		jumlah sarpras yang di sediakan	3 MACAM	Dinas Perikanan	meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan penangkapan ikan	$\sum$ total = $\sum$ fasiltasi pengelolaan penangkapan ikan yang disediakan bln Jan + Feb + Mar + Apr + Mei + Jun + Jul + Agu + Sep + Okt + Nov + Des	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	472,818,963.00
		Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data & informasi tentang perikanan yang disediakan	1 DOKUMEN	Dinas Perikanan	Tersedianya data dan informasi tentang perikanan	$\sum$ total = $\sum$ data dan infomasi tentang perikanan Tangkap bln Jan + Feb + Mar + Apr + Mei + Jun + Jul + Agu + Sep + Okt + Nov + Des	Kepala Seksi Pengelola SDI dan Sarpras Tangkap	33,183,818.00
		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah prasarana yang dibangun	3 UNIT		Terbangunnya prasarana tangkap	$\sum$ total = $\sum$ prasarana yang terbangun bln Jan + Feb + Mar + Apr + Mei + Jun + Jul + Agu + Sep + Okt + Nov + Des	Kepala Seksi Pengelola SDI dan Sarpras Tangkap	280,161,000.00

			jumlah prasarana yang disediakan untuk usaha perikanan tangkap (renovasi lampu pandu, nelayan, bangun tambat labuh)	3 unit		Tersedianya prasarana usaha perikanan tangkap	$\sum$ total = $\sum$ prasarana usaha perikanan tangkap bln Jan + Feb + Mar + Apr + Mei + Jun + Jul + Agu + Sep + Okt + Nov + Des		
			pemeliharaan lampu pandu	3 unit		Terpeliharanya lampu pandu	$\sum$ total = pemeliharaan lampu pandu bln Jan + Feb + Mar + Apr + Mei + Jun + Jul + Agu + Sep + Okt + Nov + Des		
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Ikan yang Ditebar	650.000 EKOR	Dinas Perikanan	Tersedianya dan terjaminnya sarana perikanan tangkap	$\sum$ total = $\sum$ ikan yang ditebar (n)	Kepala Seksi Pengelolaan SDI dan SARpras Tangkap	159,474,145.00

	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota		Perbandingan kelompok nelayan yang diberdayakan dengan jumlah nelayan keseluruhan di Kab Sidoarjo	40%	Dinas Perikanan	meningkatnya nelayan yang diberdayakan	Rumus = $\sum$ kelompok nelayan yang diberdayakan : $\sum$ nelayan keseluruhan Kab Sidoarjo	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	<b>160,449,819.00</b>
		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	1) Jumlah nelayan Kecil yang menerapkan hasil pelatihan; 2) Jumlah petambak garam yang menerapkan hasil pelatihan/ Pembinaan 3) jumlah	5 ORANG; 5 ORANG , 5 ORANG	Dinas Perikanan	Meningkatnya pengetahuan dan kapasitas Kelompok Nelayan, Petambak Garam	$\sum$ total = $\sum$ Nelayan kecil yang menerapkan hasil pelatihan Jan + Feb + Mar + Apr + Mei + Jun + Jul + Agu + Sep + Okt + Nov + Des $\sum$ total = $\sum$ Petambak Garam yang menerapkan hasil pelatihan Jan + Feb + Mar + Apr + Mei + Jun + Jul + Agu + Sep + Okt + Nov + Des $\sum$ total = $\sum$	Kepala Seksi Pemberdayaan Nelayan Tangkap	130,589,669.00

			POKMASWAS yang menerapkan hasil pelatihan				POKMASWAS yang menerapkan hasil pelatihan Jan + Feb + Mar + Apr + Mei + Jun + Jul + Agu + Sep + Okt + Nov + Des		
		Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	(1) Jumlah lembaga yang terbentuk (2) Jumlah lembaga yang naik kelas	2 LEMBAGA A; 2 KUB	Dinas Perikanan	1. Terbentuknya kelembagaan nelayan kecil 2. meningkatnya jumlah lembaga/ kelompok yang naik kelas	$\sum \text{total} = \sum \text{ lembaga/ kelompok yang terbentuk}$ $\sum \text{total} = \sum \text{ lembaga/ kelompok yang naik kelas}$	Kepala Seksi Pemberdayaan Nelayan Tangkap	29,860,150.00
			jumlah sosialisasi mengenai fasilitas bantuan pendanaan pembiayaan kemitraan usaha	30 ORANG	Dinas Perikanan	Meningkatnya pemahaman mengenai fasilitas bantuan pendanaan pembiayaan kemitraan usaha	$\sum \text{total} = \sum \text{ sosialisasi mengenai fasilitas bantuan pendanaan pembiayaan kemitraan usaha (n)}$		

			rapat evaluasi sosialisasi dan pembinaan pengembangan pembudidaya yang dilaksanakan	2 kali	Dinas Perikanan	Terselenggaranya rapat evaluasi sosialisasi dan pembinaan pengembangan pembudidaya	$\Sigma \text{ total} = \Sigma$ rapat evaluasi sosialisasi dan pembinaan pengembangan pembudidaya yang dilaksanakan (n)		
		Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	jumlah sosialisasi mengenai fasilitas bantuan pendanaan pembiayaan kemitraan usaha	2 KALI	Dinas Perikanan	Tersosialisasinya mengenai fasilitas bantuan pendanaan pembiayaan kemitraan usaha	$\Sigma \text{ total} = \Sigma$ sosialisasi mengenai fasilitas bantuan pendanaan pembiayaan kemitraan usaha (n)		
	<b>Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)</b>		Jumlah sosialisasi mengenai Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat	2 KALI		Tersosialisasinya mengenai Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang	$\Sigma \text{ total} = \Sigma$ mengenai Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dilaksanakan (n)	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	

			Pelelangan Ikan (TPI) yang dilaksanakan			dilaksanakan			
		Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah sosialisasi mengenai Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI yang dilaksanakan	2 KALI	Dinas Perikanan	Tersosialisasi mengenai Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI yang dilaksanakan	$\sum \text{total} = \sum$ mengenai Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI yang dilaksanakan (n)		
		Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah sosialisasi mengenai Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan yang dilaksanakan	2 KALI	Dinas Perikanan	Tersosialisasi mengenai Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan yang dilaksanakan (n)	$\sum \text{total} = \sum$ sosialisasi mengenai Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan yang dilaksanakan (n)		

	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		jumlah surat tanda daftar kapal perikanan yang diterbitkan	10 SURAT	Dinas Perikanan	Terbitnya Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	$\Sigma \text{ total} = \Sigma$ surat tanda daftar kapal perikanan yang diterbitkan Jan + Feb + Mar + Apr + Mei + Jun + Jul + Agu + Sep + Okt + Nov + Des	Kepala Seksi Pengelolaan SDI dan Sarpras Tangkap	
			jumlah fasilitas yang disediakan PD untuk penerbitan tanda daftar kapal < 5 GT	1 unit	Dinas Perikanan		$\Sigma \text{ total} = \Sigma$ fasilitas yang disediakan PD untuk penerbitan tanda daftar kapal < 5 GT (n)		

		Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	SOP penetapan persyaratan dan penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran 10 GT	1 DOKUMEN	Dinas Perikanan	Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	$\Sigma \text{ total} = \Sigma \text{ SOP}$ penetapan persyaratan dan penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran 10 GT Jan + Feb + Mar + Apr + Mei + Jun + Jul + Agu + Sep + Okt + Nov + Des	Kepala Seksi Pengelolan SDI dan Sarpras tAngkap	
			jumlah pelaku usaha perikanan yang terlayani	30 PELAKU USAHA	Dinas Perikanan	Terlayannya para pelaku usaha perikanan	$\Sigma \text{ total} = \Sigma \text{ pelaku}$ usaha perikanan yang terlayani Jan + Feb + Mar + Apr + Mei + Jun + Jul + Agu + Sep + Okt + Nov + Des		
		Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	jumlah sosialisasi mengenai penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan sampai dengan 10 GT	2 KALI	Dinas Perikanan	Terlayannya penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan sampai dengan 10 GT	$\Sigma \text{ total} = \Sigma \text{ sosialisasi}$ mengenai penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan sampai dengan 10 GT (n)	Kepala Seksi Pengelolaan SDI dan Sarpras Tangkap	



						a mengenai Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) daerah kab/ kota	GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) daerah Kab/ Kota (n)		
		Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan	jumlah sosialisas Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap	2 KALI	Dinas Perikanan	Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan	$\Sigma$ total= $\Sigma$ Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan	Kepala Seksi Pengelolaan SDI dan Sarpras Tangkap	

		n Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT i		Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Ukuran sampai dengan 10 GT	
					Tersosialisasinya Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	$\sum \text{total} = \sum \text{sosialisasi Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT (n)}$	

	Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Sosialisasi mengenai Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	2 KALI	Dinas Perikanan	Terbitnya Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT  Tersosialisasinya Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	$\sum \text{total} = \sum \text{Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT (n)}$  $\sum \text{total} = \sum \text{Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT}$	Kepala Seksi Pengelolaan SDI dan Sarpras Tangkap
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------

<p>Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p>		<p>Jumlah kapal perikanan yang Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>20 KAPAL</p>	<p>Dinas Perikanan</p>	<p>terdaftarnya kapal perikanan yang Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p><math>\Sigma \text{ total} = \Sigma</math> Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (n)</p> <p><math>\Sigma \text{ total} = \Sigma</math> kapal perikanan yang Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (n)</p>	<p>Kepala bldang Perikanan Tangkap</p>	
	<p>Penetapan Persyaratan dan</p>	<p>jumlah pelaku usaha perikanan yang</p>	<p>15 pelaku usaha</p>	<p>Dinas Perikanan</p>	<p>Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran</p>	<p><math>\Sigma \text{ total} = \Sigma</math> Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran</p>	<p>Kepala Seksi Pengelolaan SDI dan Sarpras</p>	

	Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	terlayani			Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT  Terlayannya pelaku usaha perikanan	$\sum \text{total} = \sum \text{pelaku usaha perikanan yang terlayani Jan + Feb + Mar + Apr + Mei + Jun + Jul + Agu + Sep + Okt + Nov + Des}$	Tangkap	
		SOP persyaratan dan pendaftaran tanda daftar kapal perikanan	1 DOKUMEN	Dinas Perikanan	terlaksananya SOP persyaratan dan pendaftaran tanda daftar kapal perikanan	$\sum \text{total} = \sum \text{SOP persyaratan dan pendaftaran tanda daftar kapal perikanan (n)}$			
		sosialisasi mengenai pengadaan kapal ikan dan kapal penangkap ikan	1 KALI	Dinas Perikanan	Tersosialisasinya pengadaan kapal ikan dan kapal penangkap ikan	$\sum \text{total} = \sum \text{sosialisasi pengadaan kapal ikan dan kapal penangkap ikan (n)}$			
	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran	jumlah pelaku usaha perikanan yang	30 PELAKU USAHA	Dinas Perikanan	Terlayannya Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan	$\sum \text{total} = \sum \text{pelaku usaha perikanan yang terlayani (n)}$	Kepala Seksi pemberdayaan nelayan tangkap		

		Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	terlayani			dengan Ukuran sampai dengan 10 GT			
			jumlah prosedur penerbitan surat tanda daftar pengadaan kapal penangkap ikan yang terlayani jumlah tanda daftar kapal perikanan yang dikeluarkan)	100 BERKAS	Dinas Perikanan		$\Sigma \text{ total} = \Sigma \text{ tanda daftar kapal perikanan yang dikeluarkan (n)}$  $\Sigma \text{ total} = \Sigma \text{ Terbitnya prosedur penerbitan surat tanda daftar pengadaan kapal penangkap ikan yang terlayani}$	Kepala seksi Pengelolaan SDI dan Sarpras tangkap	
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>			Prosentase peningkatan produksi perikanan budidaya	6,55%, payau 0,55%, Tawar 6%	Dinas Perikanan	meningkatnya produksi perikanan budidaya air tawar dan air payau	Rumus = $\Sigma \text{ produksi perikanan budidaya air tawar :}$ Luas lahan efektif x SR X 100%	Kepala Bidang Produksi Budidaya	29,162,923,101.00

							Rumus = $\frac{\sum \text{produksi perikanan budidaya air payau}}{\text{Luas lahan efektif} \times \text{SR}} \times 100\%$		
	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah penerbitan surat tanda daftar izin usaha budidaya	50 dokumen	Dinas Perikanan	Terbitnya surat tanda daftar izin usaha budidaya	$\sum \text{total} = \sum \text{surat tanda daftar izin usaha budidaya yang diterbitkan (n)}$	Kepala Bidang Produksi Budidaya	
		Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya,	Jumlah Sosialisasi Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	1 KALI	Dinas Perikanan	Tersosialisasinya Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau	$\sum \text{total} = \sum \text{Sosialisasi Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang}$	Kepala Seksi Pemberdayaan	

	Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	yang dilaksanakan			Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing (n)		
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta	Jumlah pembudidaya yang mendaftarkan izin usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana,	15 orang	Dinas Perikanan	Terlayannya Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	$\Sigma \text{ total} = \Sigma$ Jumlah pembudidaya yang mendaftarkan izin usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing (n)	Kepala Seksi Pemberdayaan Pembudidaya
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------

	Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing						
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		Prosentase kelompok pembudidaya ikan yang menerapkan hasil pelatihan ; Jumlah pembudidaya yang bersertifikat CBIB dan CPIB	10%, 10 orang	Dinas Perikanan	tersedianya sarana pembudidaya ikan kecil  Meningkatnya pengetahuan dan kapasitas pembudidaya ikan	$\Sigma$ pembudidaya ikan yang diberdayakan : $\Sigma$ keseluruhan penduduk di Kab Sidoarjo X 100% $\Sigma$ total = $\Sigma$ kelompok pembudidaya ikan yang menerapkan hasil pelatihan (n) $\Sigma$ total = $\Sigma$ pembudidaya yang bersertifikat CBIB dan CPIB dalam 1 tahun (n)	Kepala Bidang Produksi Budidaya	556,547,288.00

		Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	jumlah pembudidaya yang mengikuti pelatihan	30 orang	Dinas perikanan	Meningkatnya pengetahuan dan kapasitas pembudidaya ikan	$\sum \text{total} = \sum \text{peserta pembudidaya yang mengikuti pelatihan dalam 1 tahun (n)}$	Kepala Seksi Pemberdayaan Pembudidaya	392,822,288.00
			jumlah sosialisasi/ pelatihan yang dilaksanakan	2 kali	Dinas perikanan	Terlaksananya sosialisasi/ pelatihan	$\sum \text{total} = \sum \text{sosialisasi/ pelatihan yang dilaksanakan dalam 1 tahun (n)}$		
		Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	(1) Jumlah lembaga / kelompok yang terbentuk ; (2) Jumlah lembaga /kelompok yang naik kelas	2 lembaga,  2 KUB	Dinas perikanan	Terfasilitasinya Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil  Terbentuknya lembaga/ kelompok pembudidaya  Meningkatnya lembaga / kelompok yang	$\sum \text{total} = \sum \text{Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil (n)}$  $\sum \text{total} = \sum \text{lembaga / kelompok yang terbentuk dalam waktu 1 tahun (n)}$  $\sum \text{total} = \sum \text{lembaga /kelompok yang naik kelas dalam waktu 1}$	Kepala Seksi Pemberdayaan Pembudidaya	

						naik kelas	Tahun (n)		
			Jumlah pembudidaya yang memanfaatkan fasilitas bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan dan kemitraan usaha	30 orang	Dinas Perikanan	Termanfaatkannya fasilitas bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan dan kemitraan usaha bagi pembudidaya	$\sum \text{total} = \sum$ pembudidaya yang memanfaatkan fasilitas bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan dan kemitraan usaha (n)		
		Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi	frekuensi pendampingan yang dilakukan PD ke pembudidaya	100 berkas	Dinas perikanan	Terdampingnya para pembudidaya dalam Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	$\sum \text{total} = \sum$ Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (n)	Kepala Seksi Pemberdayaan Pembudidaya	

		dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan						
			jumlah pembudidaya yang mengikuti BIMTEK	25 ORANG	Dinas perikanan	Meningkatnya pengetahuan pembudidaya	$\sum \text{total} = \sum \text{pembudidaya yang mengikuti BIMTEK (n)}$	
			jumlah stake holder , kemitraan yang bekerjasama dengan PD dalam rangka pendampingan kemudahan akses pengetahuan teknologi serta informasi.	2 STAKE HOLDER / KEMITRAAN	Dinas Perikanan	Terfasilitasinya para pembudidaya dalam akses pengetahuan teknologi serta informasi.	$\sum \text{total} = \sum \text{stake holder , kemitraan yang bekerjasama dengan PD dalam rangka pendampingan kemudahan akses pengetahuan teknologi serta informasi. (n)}$	

Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah penerbitan TDPIK	50 DOKUMEN	Dinas Perikanan	terbitnya TDPIK	$\sum \text{total} = \sum$ Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (n)	Kepala Bidang Produksi budidaya	81,862,500.00
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi penetapan persyaratan prosedur penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	50 orang	Dinas Perikanan	Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya pemahaman pembudidaya mengenai penetapan persyaratan prosedur penerbitan Tanda Daftar bagi	$\sum \text{total} = \sum$ Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (n) $\sum \text{total} = \sum$ peserta sosialisasi penetapan persyaratan prosedur penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota (n)	Kepala Seksi pemberdayaan	

						Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota			
		Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah penerbitan TDPIK yang dihasilkan  jumlah pembudidaya yang terlayani TDPIK	50 dokumen  50 orang	Dinas Perikanan	Terlayannya Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota  Terbitnya TDPIK yang dihasilkan  Terlayannya para pembudidaya	$\sum \text{total} = \sum \text{Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (n)}$  $\sum \text{total} = \sum \text{penerbitan TDPIK yang dihasilkan (n)}$  $\sum \text{total} = \sum \text{pembudidaya yang terlayani TDPIK (n)}$	Kepala Seksi pemberdayaan Pembudidaya	81,862,500.00

Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		Jumlah benih ikan yang ditebar di tambak, kolam, karamba	600.000 EKOR	Dinas perikanan	tersedianya sarana pembudidayaan ikan	$\sum \text{total} = \sum \text{benih ikan yang ditebar di tambak, kolam, karamba (n)}$	Kabid Produksi Budidaya	28,606,375,8 13.00
		jumlah data dan informasi yang disediakan	1 DOKUMEN	Dinas Perikanan	Tersedianya data dan informasi	$\sum \text{total} = \sum \text{data dan informasi yang disediakan (n)}$		
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana pembudidayaan ikan yang disediakan	70 PAKET	Dinas Perikanan	Tersedianya prasarana pembudidayaan ikan	$\sum \text{total} = \sum \text{prasarana pembudidayaan ikan yang disediakan (n)}$	Kepala Seksi Sarpras Budidaya	27,350,560,3 99.00
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan	Jumlah sarana budidaya yang disediakan (benih ikan)	650.000 ekor	Dinas Perikanan	Terjaminnya sarana pembudidayaan  Tersedianya sarana pembudidayaan	$\sum \text{total} = \sum \text{sarana pembudidayaan yang disediakan (n)}$	Kepala Seksi Sarpras Budidaya	433,393,819. 00

		dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							
			jumlah sarana prasarana yang mendapat penjaminan	10 unit	Dinas Perikanan	Terjaminnya sarana prasarana budidaya	$\sum \text{total} = \sum \text{sarana prasarana yang mendapat penjaminan (n)}$		
		Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis serangan penyakit pada ikan	4 jenis	Dinas Perikanan	Penurunan pelanggaran penggunaan OIKB dan terfasilitasinya uji lingkungan  Terfasilitasinya pemeriksaan ikan	$\sum \text{total} = \sum \text{Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (n)}$  $\sum \text{total} = \sum \text{serangan penyakit pada ikan (n)}$	Kepala Seksi Kesehatan ikan dan Lingkungan	808,096,595.00
			Jumlah sampel air yang lolos uji residu	125 sampel	Dinas perikanan	Terfasilitasinya pemeriksaan ikan	$\sum \text{total} = \sum \text{sampel air yang lolos uji residu}$		

		Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi posikandu dan pengendalian lingkungan	12 KALI	Dinas perikanan	Meningkatnya pengetahuan pembudidaya	$\sum \text{total} = \sum \text{peserta yang mengikuti sosialisasi posikandu dan pengendalian lingkungan (n)}$	Kepala Seksi Kesehatan ikan dan Lingkungan	14,325,000.00
			frekuensi monitoring dan evaluasi yang dilakukan	12 KALI	Dinas Perikanan	Terlaksananya movev	$\sum \text{total} = \sum \text{monitoring dan evaluasi yang dilakukan}$		
			Jumlah pembudidaya yang tidak menggunakan OIKB	30 ORANG		Penurunan pelanggaran penggunaan OIKB yang tidak terdaftar	$\sum \text{total} = \sum \text{pembudidaya yang tidak menggunakan OIKB}$		

			frekuensi pemberian bibit ikan	1 kali		Tersedianya bibit ikan	$\Sigma$ total = $\Sigma$ rekuensi pemberian bibit ikan		
			jumlah sosialisasi mengenai pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat	1 kali		Meningkatnya pemahaman masyarakat /pembudidaya	$\Sigma$ total = $\Sigma$ sosialisasi mengenai pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat		
		Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah kajian perencanaan, pengembangan pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan darat	1 dokumen	Dinas Perikanan	Tertibnya Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	$\Sigma$ total = $\Sigma$ kajian perencanaan, pengembangan pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan darat (n)	Kepala Seksi Sarpras Budidaya	
		Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan	"1. Panjang saluran irigasi yang dibangun/direhabilitasi	(4900-5200 M)	Dinas Perikanan	Tertibnya Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan	$\Sigma$ total = $\Sigma$ Panjang saluran irigasi yang dibangun/direhabilitasi (meter) 2) panjang saluran	Kepala Seksi Sarpras Budidaya	

		tan Air untuk Pembudid ayaan Ikan di Darat	(meter) 2) panjang saluran irigasi yang dinormalisa si (meter) 3) panjang jembatan tambak yang dibangun/dir ehabilitasi (meter)"			Air untuk Pembudidayaa n Ikan di Darat	irigasi yang dinormalisasi (meter) 3) panjang jembatan (n)		
			Panjang saluran irigasi yang dibangun /direhab	(4900- 5200M3)	Dinas Perikanan	Terbangunnya saluran irigasi	$\sum \text{total} = \sum \text{Panjang}$ saluran irigasi yang dibangun /direhab (n)		
			Panjang saluran irigasi yang dinormalis asi	(4900- 5200M3)	Dinas Perikanan	Tersedianya saluran irigasi	$\sum \text{total} = \sum \text{Panjang}$ saluran irigasi yang dinormalisasi		
			panjang jembatan tambak yang dibangun/ direhab	(4900- 5200M3)	Dinas Perikanan	Terbangunnya jembatan tambak	$\sum \text{total} = \sum \text{panjang}$ jembatan tambak yang dibangun/ direhab		
			jumlah saluran irigasi yang	55 PAKET	Dinas Perikanan	Diadakannya saluran irigasi	$\sum \text{total} = \sum \text{saluran}$ irigasi yang diadakan		

			diadakan						
<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>			Prosentase Penurunan pelanggaran dibanding luas area pengawasan sumber daya kelautan	50%	Dinas Perikanan	meningkatnya pengawasan diwilayah perairan	Rumus = $\frac{\sum \text{pelanggaran yang ditemukan diperairan}}{\text{luas area pengawasan sumberdaya kelautan}} \times 100\%$	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	113,699,740.00
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota		Jumlah pelanggaran (Perikanan tangkap)	6 JENIS PELANGGARAN	Dinas Perikanan	menurunnya jumlah pelanggaran di wilayah perairan	$\frac{\sum \text{pelanggaran yang ditemukan diperairan}}{\text{luas area pengawasan sumberdaya}}$	Kepala Seksi Pengelolaan SDI dan Sarpras tAngkap	56,849,870.00

			jumlah sosialisasi mengenai pengawasan usaha perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, rawa, dan genangan air lainnya.	1 kali	Dinas Perikanan	Meningkatnya pemahaman nelayan, masyarakat	$\sum$ total = $\sum$ sosialisasi mengenai pengawasan usaha perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, rawa, dan genangan air lainnya.	
			jumlah sungai yang diawasi	2 sungai	Dinas Perikanan	Terlaksananya pengawasan sungai	$\sum$ total = $\sum$ sungai yang diawasi (n)	
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai,	Jumlah monev sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap	12 KALI	Dinas Perikanan	Menurunnya tingkat kerusakan dan tingkat pelanggaran pemanfaatan	$\sum$ total = $\sum$ Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk,	Kepala Seksi Pengelolaan SDI dan Sarpras tAngkap	56,849,870.00

	Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota				sumberdaya perairan	Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota (n)  $\sum$ total = $\sum$ monev sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap (n)		
	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan	Jumlah monev sarana dan prasarana usaha perikanan budidaya	12 KALI	Dinas Perikanan	Menurunnya tingkat kerusakan dan tingkat pelanggaran pemanfaatan sumberdaya perairan	$\sum$ total = $\sum$ Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota (n0)  $\sum$ total = $\sum$ monev sarana dan prasarana usaha perikanan Tangkap (n)	Kepala Seksi Pengelolaan SDI dan Sarpras tangkap	

		n dalam Kabupaten/Kota							
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			Prosentase peningkatan produksi olahan hasil perikanan	10 %	Dinas Perikanan	meningkatnya jumlah produksi olahan hasil perikanan	$\sum$ produksi olahan ikan yang dihasilkan : $\sum$ keseluruhan produk olahan ikan di Kab Sidoarjo X 100%	Kepala Bidang Bina Usaha Perikanan	2,859,184,614.00
	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan kecil		Jumlah tanda daftar yang dikeluarkan	160 dokumen	Dinas Perikanan	meningkatnya jumlah tanda daftar yang terbit	$\sum$ total = $\sum$ tanda daftar yang dikeluarkan Jan + Feb + Mar+Apr+Mei+Juni+Juli+Agt+SEpt+OKt +Nop +DEs	Kepala Bidang Bina Usaha Perikanan	21,309,428.00

	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi yang disediakan	1 DOKUMEN	Dinas Perikanan	Tersedianya data dan informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	$\sum$ total = $\sum$ data dan informasi yang disediakan (n)	Kepala Seksi Pelayanan Usaha Promosi dan Logistik ikan	21,309,428.00
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		Jumlah olahan ikan yang memenuhi jaminan mutu	2 jenis	Dinas Perikanan	tersedianya pembinaan mutu dan keamanan produk olahan hasil perikanan	$\sum$ total = $\sum$ Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil (n)  $\sum$ total = $\sum$ olahan ikan yang memenuhi jaminan mutu (n)	Kepala Bidang Bina Usaha Perikanan	286,124,301.00

	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	1) jumlah uji organoleptik & uji lab lainnya yang berkaitan dengan perikanan yang dilakukan 2) jumlah sosialisasi/pembinaan/pelatihan yg dilaksanakan	64 LHU	Dinas Perikanan	Keanekaragaman olahan ikan dan meningkatnya pengetahuan standar mutu  Terlaksananya Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	$\sum$ total = $\sum$ Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil (n)  $\sum$ total = $\sum$ jumlah uji organoleptik & uji lab lainnya yang berkaitan dengan perikanan yang dilakukan (n)	Kepala Seksi Pembinaan Usaha, Mutu dan Diversifikasi Produk	286,124,301.00
		jumlah sosialisasi/pembinaan/pelatihan yang dilaksanakan	1 KALI	Dinas Perikanan	Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan/wawasan pengolah dan pemasar	$\sum$ total = $\sum$ sosialisasi/pembinaan/pelatihan yang dilaksanakan (n)		
		terselenggaranya kegiatan pembinaan	1 KALI	Dinas Perikanan	Meningkatnya pemahaman dan	$\sum$ total = $\sum$ terselenggaranya kegiatan pembinaan masyarakat MPIG bandeng asap		

			masyarakat MPIG bandeng asap sidoarjo			pengetahuan/wawasan pengolah dan	sidoarjo (n)		
			terselenggaranya kegiatan pelatihan teknis pengolahan hasil perikanan	1 KALI	Dinas Perikanan	Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan/wawasan pengolah dan	$\sum$ total = $\sum$ terselenggaranya kegiatan pelatihan teknis pengolahan hasil perikanan (n)		
			terselenggaranya pelatihan GMP/CPIB	1 KALI	Dinas Perikanan	Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan/wawasan pengolah dan	$\sum$ total = $\sum$ terselenggaranya pelatihan GMP/CPIB (n)		
			terselenggaranya pelatihan produk	1 KALI	Dinas Perikanan	Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan/w	$\sum$ total = $\sum$ terselenggaranya pelatihan produk hasil perikanan non		

		hasil perikanan non konsumsi			awasan pengolah dan	konsumsi (n)		
		terselenggaranya pelatihan teknis pengolahan limbah	1 KALI	Dinas Perikanan	Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan/wawasan pengolah dan	$\sum$ total = $\sum$ terselenggaranya pelatihan teknis pengolahan limbah (n)		
		terselenggaranya pelatihan uji organoleptik	1 KALI	Dinas Perikanan	Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan/wawasan pengolah dan	$\sum$ total = $\sum$ terselenggaranya pelatihan uji organoleptic (n)		
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan		Jumlah ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha	6,6 TON	Dinas Perikanan	tersedianya bahan baku industri pengolahan ikan yang tersedia	$\sum$ total = $\sum$ Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu)	Kepala Bidang Bina Usaha Perikanan	2,551,750,88 5.00

	Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota						Daerah Kabupaten/ Kota (n)		
		Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha	6,6 ton	Dinas Perikanan	Terfasilitasinya pelaku usaha dan pemasaran	$\sum$ total = $\sum$ Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (n) $\sum$ total = $\sum$ ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha bulan Jan + Peb + Mar+Apr+Mei+ JUni+Juli+Agt+SEpt+ OKt +Nop +DEs	Kepala Seksi Pelayanan Usaha Promosi dan Logistik ikan	2,333,094,88 5.00
			terselenggaranya kegiatan gebyar gemarikan	5 ekor	Dinas Perikanan	Terlaksananya kegiatan gebyar gemarikan	$\sum$ total = $\sum$ gebyar gemarikan yang dilaksanakan (n)		

			terselenggarakan kegiatan roadshow gemarikan	9 kali	Dinas Perikanan	Terlaksananya kegiatan GEMARIKAN	$\sum$ total = $\sum$ kegiatan GEMARIKAN yang dilaksanakan(n)		
			terselenggarakan kegiatan lelang bandeng kawak	1 kali	Dinas Perikanan	Terlaksananya kegiatan lelang bandeng kawak	$\sum$ total = $\sum$ bandeng kawak dengan berat > 5 kg (n)		
			terselenggarakan kegiatan pasar bandeng murah	1 kali	Dinas Perikanan	Terlaksananya kegiatan pasar bandeng murah	$\sum$ total = $\sum$ kegiatan pasar bandeng murah yang dilaksanakan (n)		
			terselenggarakan kegiatan roadshow gemarikan	1 kali	Dinas Perikanan	Terlaksananya kegiatan roadshow GEMARIKAN	$\sum$ total = $\sum$ kegiatan roadshow gemarikan yang dilaksanakan (n)		
		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil	Jumlah fasilitasi pemasaran hasil perikanan yang di sediakan	4 fasilitasi	Dinas Perikanan	terkelolanya Depo Ikan	$\sum$ total = $\sum$ Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (n)	Kepala Seksi Pelayanan Usaha Promosi dan Logistik ikan	218,656,000.

		dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						
			Jumlah fasilitasi pemasaran hasil perikanan yang dilakukan	2 KALI	Dinas Perikanan	Terlaksananya kegiatan pameran dalam rangka promosi hasil olahan perikanan  terkelolanya kegiatan pameran dan promosi hasil perikanan	$\sum$ total = $\sum$ fasilitasi pemasaran hasil perikanan yang dilakukan (n)	

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Organisasi Perangkat Daerah	Anggaran	Sasaran Program / Kegiatan Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan</b>	12 Bulan	Dinas Perikanan	<b>9.155.718.410,00</b>	<b>Meningkatnya Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan</b>	Rumus = $\frac{\sum \text{aparatur PD}}{\sum \text{aparatur keseluruhan}} \times 100\%$	SEKRETARIS
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan 2. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanj	12 Bulan	Dinas Perikanan	<b>422,772,229.00</b>	Dimilikinya dokumen perencanaan, penganggaran data dan informasi PD	$\sum \text{total} = \sum \text{tahapan perencanaan yang dilaksanakan (n)}$ $\sum \text{total} = \sum \text{rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang}$	SEKRETARIS

		uti					ditindaklanjuti (n)		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun tepat waktu	12 Bulan	Dinas Perikanan	159,441,550.00	Tersusunnya dan dimilikinya dokumen perencanaan PD	$\sum$ total = $\sum$ dokumen perencanaan PD yang disusun tepat waktu (n)	KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	12 Bulan	Dinas Perikanan	4,061,625.00	Tersusunnya dan dimilikinya dokumen RKA – SKPD	$\sum$ total = $\sum$ dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	12 Bulan	Dinas Perikanan	9,861,625.00	Tersusunnya dan dimilikinya dokumen perubahan RKA-SKPD	$\sum$ total = $\sum$ dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun tepat waktu(n)	KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	

	SKPD								
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	12 Bulan	Dinas Perikanan	7,773,979.00	Tersusunnya dan dimilikinya dokumen DPA-SKPD	$\sum$ total = $\sum$ dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu (n)	KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	12 Bulan	Dinas Perikanan	10,275,325.00	Tersusunnya dan dimilikinya dokumen perubahan DPA-SKPD	$\sum$ total = $\sum$ dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun tepat waktu (n)	KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja PD yang disusun tepat waktu	12 Bulan	Dinas Perikanan	3,875,000.00	Tersusunnya dan dimilikinya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	$\sum$ total = $\sum$ dokumen laporan kinerja PD yang disusun tepat waktu	KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen monev PD yang tersusun	12 Bulan	Dinas Perikanan	227,483,125.00	Terevaluasinya kinerja perangkat daerah	$\sum$ total = $\sum$ dokumen monev PD yang tersusun (n)	KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase realisasi anggaran PD</b>		Dinas Perikanan	<b>6,165,321,668.00</b>	Tertibnya pengelolaan administrasi kantor	Rumus = $\sum$ gaji dan tunjangan ASN yang terealisasi : $\sum$ total anggaran X 100%	SEKRETARIS	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	12 bulan	Dinas Perikanan	6,143,939,177.00	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	$\sum$ total = $\sum$ ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan (n)	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	12 bulan	Dinas Perikanan	21,382,491.00	Peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas	$\sum$ total = $\sum$ alat tulis kantor yang tersedia (n)	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

	Tugas ASN								
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)</b>	12 bulan	Dinas Perikanan	<b>660,696,574.00</b>	<b>Meningkatnya kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi umum</b>	Rumus = $\frac{\sum \text{aparatur PD}}{\sum \text{aparatur keseluruhan}} \times 100\%$	SEKRETARIS	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik /penerangan yang tersedia	12 bulan	Dinas Perikanan	8,957,166.00	Tersedianya komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	$\sum \text{total} = \frac{\sum \text{komponen listrik /penerangan yang tersedia (n)}}{n}$	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	12 bulan	Dinas Perikanan	136,056,189.00	Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor	$\sum \text{total} = \frac{\sum \text{peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia}}{n}$	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	12 bulan	Dinas Perikanan	34,370,842.00	Tersedianya peralatan rumah tangga	$\sum$ total = $\sum$ peralatan rumah tangga yang tersedia (n)	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1. Jumlah BBM yang disediakan 2. Jumlah logistik rumah tangga kantor yang tersedia	12 bulan	Dinas Perikanan	179,476,457.00	Tersedianya bahan bakar minyak/BBM  Tersedianya logistic rumah tangga kantor	$\sum$ total = $\sum$ BBM yang disediakan (n) $\sum$ total = $\sum$ logistik rumah tangga kantor yang tersedia (n)	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan yang tersedia	12 bulan	Dinas Perikanan	7,001,775.00	Tertib administrasi pengelolaan naskah dinas	$\sum$ total = $\sum$ cetak dan penggandaan yang tersedia (n)	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Jumlah buku bahan bacaan, peraturan perundang-undangan dan koran yang	12 bulan	Dinas Perikanan	5,265,360.00	Tersedianya surat kabar, buku bacaan, peraturan perundang-undangan.	$\sum$ total = $\sum$ buku bahan bacaan, peraturan perundang-undangan dan koran	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

	ng-undangan	tersedia					yang tersedia (n)		
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material yang tersedia	12 bulan	Dinas Perikanan	6,400,000.00	Tersedianya bahan/material	$\sum$ total = $\sum$ bahan/material yang tersedia (n)	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	a. Jumlah jamuan rapat/tamu yang disediakan b. Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	12 bulan	Dinas Perikanan	3,897,911.00	Tersedianya jamuan makan dan minum Terfasilitasinya kunjungan tamu	$\sum$ total = $\sum$ jamuan rapat/tamu yang disediakan (n) $\sum$ total = $\sum$ kunjungan tamu yang difasilitasi (n)	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	a. Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti b. Jumlah rapat koordinasi	12 bulan	Dinas Perikanan	275,570,874.00	Koordinasi, konsultasi dan kegiatan kedinasan lainnya	Rumus = $\sum$ surat perintah tugas yang ditindaklanjuti : surat keseluruhan surat x 100% $\sum$ total =	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

		dan konsultasi yang diselenggarakan					$\Sigma$ rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan (n)		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis yang dikelola	12 bulan	Dinas Perikanan	3,700,000.00	Terkelolanya arsip dinas	$\Sigma$ total = $\Sigma$ arsip dinamis yang dikelola (n)	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
			12 bulan	Dinas Perikanan					
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah dan Jenis BMD yang diadakan</b>	12 bulan	Dinas Perikanan	<b>828,518,229.00</b>	<b>Diadakannya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	$\Sigma$ total = $\Sigma$ dan Jenis BMD yang diadakan (n)	SEKRETARIS	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	12 bulan	Dinas Perikanan	562,124,875.00	Diadakannya kendaraan dinas operasional/lapangan	$\Sigma$ total = $\Sigma$ kendaraan dinas/operasional yang diadakan (n)	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

	Lapangan								
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang diadakan	12 bulan	Dinas Perikanan	254,097,554.00	Diadakannya peralatan dan mesin lainnya	$\sum$ total = $\sum$ peralatan dan perlengkapan gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang diadakan (n)	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang diadakan	12 bulan	Dinas Perikanan	-	Diadakannya alat angkutan darat tak bermotor	$\sum$ total = $\sum$ aset tak berwujud yang diadakan (n)	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	Pengadaan alat angkutan darat tak bermotor	jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang diadakan	12 bulan	Dinas Perikanan	12,295,800.00	Diadakannya alat angkutan darat tak bermotor	$\sum$ total = $\sum$ alat angkutan darat tak bermotor yang diadakan (n)	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	12 bulan	Dinas Perikanan	850,917,720.00	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Rumus = $\frac{\sum \text{aparatur PD}}{\sum \text{aparatur keseluruhan}} \times 100\%$	SEKRETARIAT	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar	12 bulan	Dinas Perikanan	223,413,720.00	Kelancaran pelaksanaan tugas	$\frac{\sum \text{total}}{\sum \text{Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar (n)}}$	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayar 2. Jumlah tenaga keamanan kantor yang terbayar 3. Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar;	12 bulan	Dinas Perikanan	627,504,000.00	Peningkatan kenyamanan kinerja kantor, tersedianya jasa pelayanan umum kantor	$\frac{\sum \text{total}}{\sum \text{Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayar (n)}}$ $\frac{\sum \text{total}}{\sum \text{tenaga keamanan kantor yang terbayar (n)}}$ $\frac{\sum \text{total}}{\sum \text{Jumlah pengelola keuangan}}$	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

		4. Jumlah tenaga non ASN yang terbayar					dan barang yang terbayar (n) $\sum$ total = $\sum$ tenaga non ASN yang terbayar (n)		
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan</b>	12 bulan	Dinas Perikanan	<b>134,458,700.00</b>	<b>Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	$\sum$ total = $\sum$ barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (n)	SEKRETARIAT	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizina	1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara; 2. Jumlah bahan peralatan dan bahan pembersih	12 bulan	Dinas Perikanan	46,692,500.00	Tersedianya dan terpeliharanya kendaraan dinas operasional Terbayarnya pajak dan perizinan	$\sum$ total = $\sum$ kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (n) $\sum$ total = $\sum$ bahan peralatan	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

	n Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	kendaraan yang tersedia 3. Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya				kendaraan dinas/operasional Tersedianya bahan/peralatan pembersih kendaraan	dan bahan pembersih kendaraan yang tersedia (n) $\sum$ total = $\sum$ STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	12 bulan	Dinas Perikanan	12,000,000.00	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	$\sum$ total = $\sum$ peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (n)	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	12 bulan	Dinas Perikanan	59,400,000.00	Terpeliharanya/terehabnya sarpras gedung kantor/bangunan lainnya	$\sum$ total = $\sum$ sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/re	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

	atau Bangunan Lainnya						habilitasi (n)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	12 bulan	Dinas Perikanan	16,366,200.00	Terpeliharanya/terehabnya sarpras gedung kantor/bangunan lainnya	$\sum$ total = $\sum$ Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi (n)	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>1. Persentase ASN yang disiplin 2. Persentase ASN yang mengikuti</b>		Dinas Perikanan	<b>3,669,650.00</b>	<b>Tertibnya administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	Rumus = $\sum$ aparatur PD yang disiplin : $\sum$ aparatur keseluruhan x 100% Rumus =	SEKRETARIS	

		pelatihan yang bersertifikat					$\sum$ aparatur PD yang mengikuti pelatihan: $\sum$ aparatur keseluruhan x 100%		
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai Perangkat Daerah yang dilakukan	12 bulan	Dinas Perikanan	3,669,650.00	Terlaksananya monev, evaluasi dan kinerja pegawai	$\sum$ total = $\sum$ monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai Perangkat Daerah yang dilakukan (n)	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan informal	12 bulan	Dinas Perikanan	-	tingkat penyelesaian tugas setelah mengikuti peningkatan SDM	$\sum$ total = $\sum$ ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan informal (n)	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	1. Persentase BMD SKPD yang telah teregistrasi 2. Persentase BMD SKPD yang telah tersertifikasi	12 bulan	Dinas Perikanan	11,363,620.00	<b>Tertibnya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah</b>	Rumus = $\frac{\sum \text{BMD SKPD yang telah teregistrasi}}{\sum \text{BMD keseluruhan}} \times 100\%$ Rumus = $\frac{\sum \text{BMD SKPD yang telah tersertifikasi}}{\sum \text{BMD keseluruhan}} \times 100\%$	SEKRETARIS	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan RKBMD yang disusun	12 bulan	Dinas Perikanan	6,663,620.00	Dimikinya laporan RKBMD yang disusun	$\sum \text{total} = \frac{\sum \text{Laporan RKBMD yang disusun (n)}}{n}$	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan BMD SKPD yang disusun	12 bulan	Dinas Perikanan	4,700,000.00	Dimikinya laporan BMD SKPD yang disusun	$\sum \text{total} = \sum \text{laporan BMD SKPD yang disusun}$	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

		pada SKPD	tepat waktu				tepat waktu	tepat waktu (n)		

Indikator kinerja , indikator program dan kegiatan beserta targetnya sudah dibahas pada alenia diatas, tingkat konsumsi makan ikan merupakan indikator nasional dan strategis. Dibahas sebagai berikut :

Target Tingkat Konsumsi Makan Ikan Tahun 2016-2021 Kab Sidoarjo

No	URAIAN	TAHUN (Kg/Kapita/Thn)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Konsumsi Makan Ikan	28,47	29,15	31,12	39,06	39,29	39,53

Realisasi Tingkat Konsumsi Makan Ikan Tahun 2016-2021 Kab Sidoarjo

No	URAIAN	TAHUN (Kg/Kapita/Thn)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Konsumsi Makan Ikan	28,95	30,51	38,87	39,48	39,68	

Dengan Rumus Perhitungan sebagai berikut :

$$AKI = KIDRT + \text{Konsumsi Luar Rumah Tangga} + \text{Tidak Tercatat}$$



## **BAB VII**

# **INDIKATOR KINERJA DINAS PERIKANAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Organisasi. Hal ini mengingat rencana kinerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang. Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan kerja organisasi secara riil. Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan OPD, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan OPD. Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur untuk mengukur kinerja organisasi maka indikator kinerja program pembangunan Daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :

- (1) Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah,

- (2) Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan,
- (3) Memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah, dan
- (4) Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Secara rinci, penetapan indikator kinerja program pembangunan Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 – 2021 sesuai dengan urusan pemerintahan bidang perikanan, dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 7.1

## Indikator Kinerja Dinas Perikanan yang mengacu RPJMD Tahun 2016-2021

No	Sasaran OPD	Indikator Sasaran Organisasi Perangkat Daerah (IKU OPD)	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Kinerja						Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Target 2021
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	Reco fusing 2020	2021	
1	Meningkatnya kesejahteraan nelayan, pembudidaya dan pengolah	Persentase peningkatan pendapatan nelayan	1,81% (Rp. 10.069.03)	0,09 %	1,21%	1,01 %	1 %	1 %	0,5 %	Rp. 10.600.000	0,55 %
		a. Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya air payau	-0,03% (75.085.800 kg)	0,3 %	0,35%	0,2%	0,40%	0,5%	0,5%	77.038.755 kg	0,51 %
		b. Persentase peningkatan produksi perikanan Budidaya Air Tawar	-0,01% (18.132.000 kg)	0,3%	0,39%	3%	4%	5%	5%	23.907.109 kg	3,1%
		Nilai produksi hasil olahan perikanan Krupuk udang	Rp. 53.000/kg	Rp. 55.000 /kg	Rp. 56.000 / kg	Rp. 58.000 /kg	Rp. 60.000 /kg	Rp. 63.000 /kg	Rp. 60.500/kg	Rp. 67.000/kg	Rp. 67.000/kg
		Nilai produksi hasil olahan perikanan Bandeng asap	Rp. 180.000/kg	Rp. 120.000/kg	Rp. 123.000/kg	Rp. 125.000/kg	Rp. 128.000 /kg	Rp. 130.000 /kg	Rp. 127.500/kg	Rp. 130.000/kg	Rp. 127.000/kg

**Tabel 7.2**  
**Formulasi Penghitungan Indikator Kinerja Utama**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Unit kerja yang Bertanggung jawab	Keterangan
1	Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan, Pembudidaya dan Pengolah	Persentase Peningkatan Pendapatan Nelayan	<p>"Definisi Operasional :</p> <p>Persentase peningkatan pendapatan nelayan merupakan selisih dari pendapatan kotor dikurangi biaya operasional tahun n dikurangi pendapatan tahun sebelumnya,selanjutnya dibagi dengan pendapatan Tahun sebelumnya</p> <p>Formulasi Perhitungan :</p> $\frac{n - (n-1)}{(n-1)} \times 100 \%$ <p>Ket :</p> <p>Pn = Persentase Peningkatan Pendapatan Nelayan  n = Pendapatan Nelayan pada Tahun N  n-1 = Pendapatan Nelayan pada Tahun Lalu</p>	Bidang Perikanan Tangkap	Data diperoleh dari Dokumen laporan statistik berkala dan tahunan perikanan tangkap
		Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Air Payau	<p>"Definisi Operasional :</p> <p>Peningkatan produksi perikanan budidaya air payau adalah jumlah produksi perikanan budidaya air payau dalam satuan Kg.</p>	Bidang Produksi Budidaya	Data diperoleh dari Dokumen laporan statistik

			<p>Formulasi Perhitungan :</p> $\frac{n - (n-1)}{(n-1)} \times 100 \%$ <p>Ket :  PPBpayau = Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya air payau  n = Produksi Perikanan Budidaya air payau pada Tahun N  n -1 = Produksi Perikanan Budidaya air payau pada Tahun Lalu"</p>		berkala dan tahunan Perikanan Budidaya
	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar	"Definisi Operasional : Peningkatan produksi perikanan budidaya air tawar adalah jumlah produksi perikanan budidaya air tawar dalam satuan Kg.  Formulasi Perhitungan : $\frac{n - (n-1)}{(n-1)} \times 100 \%$ Ket : PPBtawar = Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya air tawar n = Produksi Perikanan Budidaya air tawar pada Tahun N n-1 = Produksi Perikanan Budidaya air tawar pada Tahun Lalu"	Bidang Produksi Perikanan Budidaya	Data diperoleh dari Dokumen laporan statistik berkala dan tahunan Perikanan Budidaya	
		"Definisi Operasional :		Data diperoleh	

		<p>Nilai Tambah Produksi Hasil Olahan Perikanan Krupuk Udang</p>	<p>Nilai tambah merupakan suatu pertambahan nilai suatu komoditas karena mengalami proses pengolahan, pengangkutan, ataupun penyimpanan dalam suatu produksi.</p> <p>Formulasi Perhitungan :</p> $Nt = \{(\text{Nilai Produk} - (\text{Bahan Baku} + \text{input lainnya} + \text{tenaga kerja}))\}$ <p>Ket :</p> <p>Nt = Nilai tambah produksi hasil olahan perikanan krupuk udang"</p>	<p>Bidang Bina Usaha Perikanan</p>	<p>dari Dokumen laporan statistik berkala dan tahunan olahan hasil perikanan</p>
		<p>Nilai Tambah Produksi Hasil Olahan Perikanan Bandeng Asap</p>	<p>"Definisi Operasional :</p> <p>Nilai tambah merupakan suatu pertambahan nilai suatu komoditas karena mengalami proses pengolahan, pengangkutan, ataupun penyimpanan dalam suatu produksi.</p> <p>Formulasi Perhitungan :</p> $Nt = \{(\text{Nilai Produk} - (\text{Bahan Baku} + \text{input lainnya} + \text{tenaga kerja}))\}$ <p>Ket :</p> <p>Nt = Nilai tambah produksi hasil olahan perikanan bandeng"asap</p>	<p>Bidang Bina Usaha Perikanan</p>	<p>Data diperoleh dari Dokumen laporan statistik berkala dan tahunan olahan hasil perikanan</p>

Indikator kinerja , indikator program dan kegiatan beserta targetnya sudah dibahas pada alenia diatas, Angka Konsumsi Ikan (AKI) merupakan indikator nasional dan strategis. Target AKI Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut dibawah ini:

Target Angka Konsumsi Ikan Tahun 2016-2021

No	URAIAN	TAHUN (Kg/Kapita/Thn)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Angka Konsumsi Ikan	28,47	29,15	31,12	39,06	39,29	39,53

Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$AKI = A+B+C$$

$$AKI = KIDRT + KONSUMSI LUAR RUMAH TANGGA + KONSUMSI TIDAK TERCATAT$$

Keterangan :

Jumlah AKI A = (Konsumsi Di Rumah Tangga)

Jumlah AKI B = (Konsumsi Luar Rumah Tangga)

Jumlah AKI C = (Konsumsi Tidak Tercatat)



# BAB VIII

## PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 - 2021 sesungguhnya adalah dokumen perencanaan pembangunan yang disusun untuk periode lima tahun dengan berpedoman RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 - 2021.

Perubahan Rencana Strategis ini disusun selain sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan stakeholders untuk merumuskan program tahunan, juga sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Sidoarjo selama periode 2016 - 2021 agar terpadu dan terfokus sesuai tupoksi yang ada.

Pada Tahun 2021 saat terjadi pergantian pimpinan Daerah melalui Pilkada, dimana Bupati terpilih masih dalam proses penetapan dan RPJMD yang baru masih dalam proses penyusunan maka Sasaran yang harus dicapai tetap berdasarkan RPJMD dan Renstra OPD Tahun 2016 – 2021.

Pembangunan yang akan berlangsung lima tahun kedepan bukan saja diharapkan mampu melahirkan kegiatan perekonomian rakyat yang makin berdaya, makin berkurang jumlah rakyat dan penduduk miskin dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat, tetapi sekaligus juga mampu mewujudkan masyarakat Sidoarjo yang makin sejahtera, berpendidikan, berkualitas dan beriman serta taqwa kepada Allah SWT, dan disamping itu juga diharapkan kesenjangan atau disparitas antar wilayah dapat berkurang secara proposional.

Dalam menyusun rencana, melaksanakan dan menjamin efektivitas pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo agar sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka dibutuhkan tiga pilar *Good Governance* antara lain Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi masyarakat dan stakeholders, tiga pilar ini merupakan spirit yang harus dimiliki dan menjadi dasar bagi pemangku

kepentingan dan stakeholders terkait guna menjamin berbagai program yang direncanakan benar-benar berjalan seperti yang ditetapkan.





















